

**PENERAPAN KEBIJAKAN MASYARAKAT ASLI DI AUSTRALIA DAN
SELANDIA BARU MASA PEMERINTAHAN SCOTT MORRISON &**

JACINDA ARDERN

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ATIFA ZAKIAH MUTMAINNA

20323320

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**PENERAPAN KEBIJAKAN MASYARAKAT ASLI DI AUSTRALIA DAN
SELANDIA BARU MASA PEMERINTAHAN SCOTT MORRISON &
JACINDA ARDERN
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ATIFA ZAKIAH MUTMAINNA

20323320

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Penerapan Kebijakan Masyarakat Asli di Australia dan Selandia Baru Masa Pemerintahan Scott Morrison & Jacinda Ardern

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

24 Juni 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.
2. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
3. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

Hangga Fathana
Karina
Enggar Furi Herdianto

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 24 Juni 2024



Atifa Zakiah Mutmainna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Cakupan penelitian	7
1.5. Tinjauan Pustaka	8
1.6. Kerangka Pemikiran	10
1.7. Argumen Sementara	15
1.8. Metode Penelitian	15
1.8.1. Jenis Penelitian	15
1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian	16
1.8.3. Metode Pengumpulan Data	16
1.8.4. Proses Penelitian	16
1.9. Sistematika Pembahasan	17
BAB 2 ANALISIS KEBIJAKAN MASYARAKAT ASLI DI AUSTRALIA	18
2.1. Tingkat <i>De-commodification</i> dalam Kehidupan Masyarakat Asli Australia	18
2.1.1. <i>Old-Age Pensions</i>	19
2.1.2. <i>Sickness Benefits</i>	20
2.1.3. <i>Employment Insurance</i>	22
2.2. Pemenuhan <i>Social Rights</i> Masyarakat Asli di Australia	26
2.3. Penyediaan <i>Welfare Provision</i> untuk Masyarakat Asli oleh Australia	29
2.4. Pemberian <i>Benefits</i> oleh Australia bagi Masyarakat Asli	32
BAB 3 ANALISIS KEBIJAKAN MASYARAKAT ASLI DI SELANDIA BARU	36
3.1. Tingkat <i>De-commodification</i> dalam Kehidupan Masyarakat Asli Selandia Baru	36
3.1.1. <i>Old-Age Pensions</i>	36
3.1.2. <i>Sickness Benefits</i>	38

3.1.3. <i>Employment Insurance</i>	40
3.2. Pemenuhan <i>Social Rights</i> Masyarakat Asli di Selandia Baru	43
3.3. Penyediaan <i>Welfare Provision</i> untuk Masyarakat Asli oleh Selandia Baru	47
3.4. Pemberian <i>Benefits</i> oleh Selandia Baru bagi Masyarakat Asli	51
BAB 4 PENUTUP	55
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Rekomendasi	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Populasi Penduduk di Australia tahun 2021	2
Tabel 2. Jumlah Populasi Penduduk di Selandia Baru tahun 2021	3
Tabel 3. Kategori Tingkat <i>De-Commodification</i>	12
Tabel 4. Kategori Aspek <i>Social Rights</i>	13
Tabel 5. Kategori Aspek <i>Welfare Provision</i>	13
Tabel 6. Kategori Aspek <i>Benefits</i>	14
Tabel 7. Analisis Teori <i>Welfare Capitalism</i> dalam Penerapan Kebijakan Masyarakat Asli di Australia	34
Tabel 8. Tingkat Pekerja dan Pengangguran Masyarakat Maori Berdasarkan Usia Tahun 2021	42
Tabel 9. Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Selandia Baru Usia 25-64 Tahun 2017-2021	46
Tabel 10. Jumlah Bisnis Maori Berdasarkan Kelompok Industri Tahun 2017-2022	48
Tabel 11. Analisis Teori <i>Welfare Capitalism</i> dalam Penerapan Kebijakan Masyarakat Asli di Selandia Baru	52
Tabel 12. Perbedaan Hasil Analisis Teori <i>Welfare Capitalism</i> dalam Penerapan Kebijakan Masyarakat Asli di Australia dan Selandia Baru	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tingkat Kesenjangan Lapangan Kerja Usia 15-64 Tahun Berdasarkan Keterpencilan, 2018-2019	23
Grafik 2. Angka Harapan Hidup Penduduk Selandia Baru Terus Meningkat	39
Grafik 3. GDP Per Capita Selandia Baru Tahun 2017-2022	41
Grafik 4. Jumlah Pendaftar Maori di Pendidikan Tinggi Menurut Sub-sektor dan Gender Tahun 2019	45

DAFTAR SINGKATAN

ACT	: <i>Australian Capital Territory</i>
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
ATSIC	: <i>Aboriginal and Torres Strait Islander Commission</i>
CATSI	: <i>The Corporations Aboriginal and Torres Strait Islander</i>
CDP	: <i>Community Development Program</i>
IAS	: <i>Indigenous Advancement Strategy</i>
IPETCA	: <i>Indigenous People Economic and Trade Cooperation Arrangement</i>
IPP	: <i>Indigenous Procurement Policy</i>
LSM	: <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
MEO	: <i>Maori Electoral Option</i>
NATSIEC	: <i>National Aboriginal and Torres Strait Islander Education Council</i>
NIAA	: <i>National Indigenous Australians Agency</i>
NSW	: <i>New South Wales</i>
NT	: <i>Northern Territory</i>
NZS	: <i>New Zealand Superannuation</i>
PDB	: <i>Produk Domestik Bruto</i>
QLD	: <i>Queensland</i>
SA	: <i>South Australia</i>
TAS	: <i>Tasmania</i>
VIC	: <i>Victoria</i>
WA	: <i>Western Australia</i>

ABSTRAK

Permasalahan kesenjangan antara masyarakat asli dan non-pribumi masih kerap terjadi di banyak negara, termasuk Australia dan Selandia Baru. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan pemerintah yang kurang maksimal dalam penerapan kebijakan masyarakat asli. Pada 2019, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan bahwa Australia telah gagal mensejahterakan penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. Di sisi lain, Jacinda Ardern di Selandia Baru juga dikritik oleh suku Maori karena dianggap gagal meningkatkan taraf hidup masyarakat asli. Maka dari itu, teori *Welfare Capitalism* menjadi acuan penelitian ini untuk melihat seberapa baik penerapan kebijakan masyarakat asli di kedua negara tersebut. Analisis akan ditinjau dari berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial hingga politik. Lebih lanjut, hasil dari penelitian ini menunjukkan jika tingkat keberhasilan penerapan kebijakan masyarakat asli di Selandia Baru pada masa pemerintahan Jacinda Ardern lebih unggul dibanding penerapan kebijakan serupa di Australia pada masa pemerintahan Scott Morrison.

Kata-kata kunci: Kebijakan masyarakat asli, Scott Morrison, Jacinda Ardern, *Welfare Capitalism*, Australia, Selandia Baru.

ABSTRACT

The problem of inequality between indigenous and non-indigenous people still occurs frequently in many countries, including Australia and New Zealand. This is caused by the government's tendency to be less than optimal in implementing indigenous community policies. In 2019, Prime Minister Scott Morrison said that Australia had failed to prosper Aboriginal and Torres Strait Islander people. On the other hand, Jacinda Ardern in New Zealand was also criticized by the Maori tribe for failing to improve the standard of living of indigenous people. Therefore, the theory of Welfare Capitalism is the reference for this research to see how well indigenous people's policies are implemented in these two countries. The analysis will be reviewed from various aspects, starting from economic, educational, health, social and political aspects. Furthermore, the result of this research shows that the level of success in implementing indigenous policies in New Zealand during the Jacinda Ardern government was superior to the implementation of similar policies in Australia during the Scott Morrison government.

Keywords: Indigenous policies, Scott Morrison, Jacinda Ardern, *Welfare Capitalism*, Australia, New Zealand

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara di dunia terdiri dari berbagai macam suku dan ras, tak terkecuali Australia dan Selandia Baru. Sebagai negara serumpun tetangga, Australia dan Selandia Baru memiliki banyak persamaan. Mulai dari letak wilayah yang sama, latar belakang yang nyaris tak ada bedanya, sama-sama memiliki sistem pemerintahan parlementer dan monarki konstitusional, bahkan dalam bidang ekonomi pun pendapatan per kapita Australia dan Selandia Baru tidak jauh berbeda. Dilansir dari laman resmi World Bank, pendapatan per kapita Australia tahun 2021 kurang lebih sebesar \$60,697 dan Selandia Baru sebesar \$49,996 (The World Bank, n.d.).

Dalam aspek sejarah adat dan kebudayaan, Australia mempunyai dua penduduk asli, yaitu suku Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres (Kedutaan Besar Australia 2023). Suku Aborigin diperkirakan telah hidup di benua Australia sejak 40.000 tahun yang lalu dan menjadi suku pertama yang mendiami benua ini. Selain itu, suku Aborigin juga merupakan pewaris tradisi kebudayaan tertua yang masih ada hingga saat ini. Sayangnya, penduduk suku Aborigin perlahan-lahan mulai tersingkir keberadaannya ketika Inggris mulai menjajah Australia pada tahun 1778.

Tabel 1. Jumlah Populasi Penduduk di Australia tahun 2021

Wilayah	Aborigin & Kepulauan Selat Torres	Non-pribumi	Total
NSW	339.710	7.757.352	8.097.062
Vic.	78.696	6.469.126	6.547.822
Qld	273.119	4.942.695	5.215.814
SA	52.069	1.750.532	1.802.601
WA	120.006	2.629.359	2.749.365
Tas.	33.857	533.382	567.239
NT	76.487	171.664	248.151
ACT	9.525	442.983	452.508
Aust. (a)	983.709	24.701.703	25.685.412

Sumber: Australian Bureau of Statistics (2021)

Tabel di atas menunjukkan data terakhir penduduk Australia pada tahun 2021, di mana masyarakat asli hanya tersisa sekitar 983.709 jiwa atau 3,8% dari total seluruh populasi penduduk Australia (Australian Bureau of Statistics 2021).

Kedatangan kolonial Inggris di benua Australia membuat masyarakat asli Australia harus meninggalkan tanah tempat mereka tinggal dan mengakibatkan penduduk Australia semakin didominasi oleh para migran maupun keturunannya. Hal tersebut menciptakan kesenjangan sosial terhadap masyarakat asli dan masyarakat non-pribumi Australia, terutama dalam sektor perekonomian. Kesenjangan sosial yang dirasakan oleh masyarakat asli Australia bermula dari sektor ekonomi atau pendapatan. Kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat asli membuat angka pengangguran sangat tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan warga non-pribumi Australia yang lebih banyak memiliki pekerjaan sehingga kesejahteraan hidup mereka tidak terganggu. Adanya kesenjangan sosial

membuat masyarakat asli Australia kurang merasakan yang namanya kesejahteraan.

Sama seperti Australia, Selandia Baru juga mempunyai masyarakat asli yang dikenal dengan nama penduduk suku Maori. Suku Maori berasal dari Kepulauan Pasifik dan datang ke daratan Selandia Baru sebelum tahun 1300 M (Ministry for Culture and Heritage 2019). Sekitar awal tahun 1800-an, orang-orang Eropa datang dan terjadi peperangan dikarenakan bangsa Eropa yang ingin merampas tanah suku Maori sehingga orang-orang mereka perlahan-lahan berkurang (Ministry for Culture and Heritage 2019). Namun, berbeda dengan suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres di Australia, suku Maori berhasil memperoleh kembali hak atas tanah di Selandia Baru setelah Perang Dunia Kedua dan diakui suaranya dalam Perjanjian Waitangi (Ministry for Culture and Heritage 2019).

Tabel 2. Jumlah Populasi Penduduk di Selandia Baru tahun 2021

Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Suku Maori	436.000	439.300	875.300
Non-pribumi	2.539.200	2.577.300	5.116.500
		Total	5.991.800

Sumber: New Zealand Statistics (2021)

Dilihat dari tabel di atas, jumlah populasi penduduk di Selandia Baru jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Australia. Namun, jumlah penduduk suku Maori lebih banyak di Selandia Baru, yakni sekitar 17,1% dari total keseluruhan populasi negara (New Zealand Government 2021b).

Meskipun hak atas tanah suku Maori telah dijamin oleh Perjanjian Waitangi, tidak bisa dipungkiri jika pemerintah Selandia Baru masih perlu memaksimalkan upaya untuk mengurangi tingkat kesenjangan antara penduduk suku Maori dan non-Maori. Salah satunya kesenjangan angka harapan hidup yang masih terlihat di mana mencapai 7,4 tahun lebih rendah dibandingkan masyarakat non-Maori (IWGIA 2020). Selain itu, masih banyaknya penduduk Maori yang menganggur juga menjadi tantangan pemerintah Selandia Baru dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat asli agar dapat berpartisipasi pada aspek perekonomian negara. Hal tersebut membawa kesenjangan sosial antara masyarakat Maori dan non-Maori di Selandia Baru. Kedua negara bertetangga yang unggul dalam banyak aspek ini justru sama-sama menghadapi tantangan terhadap permasalahan masyarakat asli di masing-masing negara.

Sudah sejak lama pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir kesenjangan antara masyarakat asli dan non-pribumi di Australia dan Selandia Baru. Namun, belum ada perubahan hasil yang signifikan dari kedua negara tersebut. Hal yang menjadi poin penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat asli terletak pada penerapan kebijakan masyarakat asli itu sendiri. Pada tahun 2008, Perdana Menteri Australia yang saat itu menjabat adalah Kevin Rudd menyampaikan permintaan maaf secara resmi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat asli Australia (Alexandra and Daniah 2020). Permintaan maaf dari Kevin Rudd disini menggambarkan ketidakseriusan pemerintah Australia dalam membuat politik kebijakan untuk menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat asli Australia. Terlebih lagi ketika Perdana Menteri Scott Morrison

yang memberikan pendapatnya kepada media mengenai pengakuannya tentang pemerintah Australia yang belum sepenuhnya berhasil dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat asli Australia di mana dia mengatakan jika upaya yang dilakukan sejak 2008 belum maksimal. Pada 2019, Morrison menyatakan janjinya kepada masyarakat asli Australia bahwa dia akan memaksimalkan kebijakan pembangunan untuk penduduk suku Aborigin demi meningkatkan kesejahteraan suku tersebut (Khotimah 2019).

Di Selandia Baru sendiri masyarakat Maori juga seringkali masih mengalami kesulitan. Pemerintah beberapa kali melakukan pelanggaran yang telah tertulis di Perjanjian Waitangi (IWGIA 2020). Hal tersebut membuat pengurangan kesenjangan antara suku Maori dan non-Maori cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2017, Jacinda Ardern terpilih menjadi Perdana Menteri Selandia Baru dan berhasil memenangkan Partai Buruh setelah hampir satu dekade (Britannica 2024). Kemenangan ini disambut baik oleh masyarakat Selandia Baru, khususnya suku Maori. Namun, pada 2019, masyarakat Maori melakukan kritik karena mereka menganggap jika pemerintah gagal meningkatkan taraf hidup masyarakat asli di negara tersebut (Britt's 2019). Selain itu, populasi penduduk suku Maori juga sempat menurun ketika Pandemi Covid-19 melanda diakibatkan tingkat vaksinasi untuk masyarakat Maori yang masih rendah dibanding etnis lainnya (Smale 2021).

Melihat dari permasalahan di atas, penulis akan membahas mengenai penerapan kebijakan masyarakat asli dengan studi kasus Australia dan Selandia Baru sebagai dua negara yang mempunyai banyak similaritas dalam berbagai aspek. Penelitian ini akan menganalisis tentang bagaimana penerapan kebijakan

masyarakat asli pemerintah Australia dan Selandia Baru khususnya pada rentang masa jabatan Scott Morrison dan Jacinda Ardern sebagai perdana menteri masing-masing negara, mengingat kedua perdana menteri tersebut berasal dari latar belakang partai yang berbeda. Penulis akan melakukan analisis tingkat keberhasilan terhadap penerapan kebijakan pemerintahan Australia dan Selandia Baru dalam permasalahan masyarakat asli. Masalah penanganan terhadap masyarakat asli di negara yang mempunyai banyak kesamaan, yakni Australia dan Selandia Baru akan menjadi titik fokus pembahasan penulis dalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat keberhasilan penerapan kebijakan masyarakat asli di Australia dan Selandia Baru pada masa pemerintahan Scott Morrison & Jacinda Ardern?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas mengenai perbedaan penerapan kebijakan masyarakat asli di Australia dan Selandia Baru, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan pemerintah Australia dan Selandia Baru dalam penerapan kebijakan masyarakat asli.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemerintah Australia dan Selandia Baru dalam menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat asli masing-masing negara.

3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang bisa dilakukan pemerintah Australia dan Selandia Baru dalam memaksimalkan penerapan kebijakan masyarakat asli.

1.4. Cakupan penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai bagaimana tingkat keberhasilan penerapan kebijakan masyarakat asli di Australia dan Selandia Baru sebagai dua negara tetangga yang memiliki banyak persamaan, baik dari letak geografis wilayahnya hingga pemerintahannya. Penelitian ini akan menyorot pada analisis penerapan kebijakan masyarakat asli di antara dua negara tersebut. Cakupan penelitian ini berada pada masa pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison di Australia (2018-2022) dan Perdana Menteri Jacinda Ardern di Selandia Baru (2017-2023). Penulis membatasi cakupan penelitian pada rentang tahun tersebut karena adanya pernyataan Scott Morrison pada 2019 yang mengatakan jika upaya yang dilakukan pemerintah Australia untuk meningkatkan kualitas hidup suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres sejak 2008 belum maksimal dan Morrison berjanji akan memaksimalkan upaya tersebut (Khotimah 2019). Pada masa pemerintahan Jacinda Ardern, suku Maori melakukan kritik kepada pemerintah Selandia Baru karena kurangnya tindakan pemerintah dalam membantu suku Maori yang sedang berada dalam keadaan krisis dan darurat (Britt's 2019). Penulis juga membatasi cakupan penelitian dengan tujuan untuk mempermudah dalam mencari data-data yang aktual dan relevan dengan penelitian penulis.

1.5. Tinjauan Pustaka

Sebagai tinjauan, penulis menggunakan buku oleh Andrew Armitage di mana dalam buku tersebut membahas tentang perbandingan kebijakan asimilasi penduduk suku Aborigin dalam hal ini adalah negara Kanada dan Selandia Baru. Buku yang ditulis oleh Andrew Armitage ini menjelaskan bagaimana penduduk asli di Australia, Kanada dan Selandia Baru masih menjadi minoritas di negara mereka sendiri. Andrew Armitage membandingkan politik kebijakan masyarakat asli di ketiga negara tersebut untuk melihat sejauh mana upaya pemerintah masing-masing negara dalam memperlakukan penduduk asli secara adil dengan memperhatikan aspek dari *General Structure of Aboriginal, Indian and Maori Policy, Child Welfare Policy* hingga persamaan dan perbedaan antara ketiga negara tersebut (d'Errico, Armitage, and Hazlehurst 1996). Fokus penelitian Andrew Armitage pada buku ini terletak pada bagaimana struktur umum kebijakan masyarakat asli dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat asli, mulai dari pengakuan penduduk asli sebagai warga negara, penyediaan lapangan pekerjaan hingga upaya mensejahterakan hidup anak-anak penduduk asli.

Selanjutnya ada penelitian dari John Chesterman di mana di dalam penelitiannya, Chesterman mengkaji mengenai kurangnya peran perwakilan masyarakat asli Australia dalam pembuatan kebijakan *national Indigenous affairs* atau urusan masyarakat adat nasional (Chesterman 2008). Penelitian ini juga membahas tentang kegagalan *Aboriginal and Torres Strait Islander Commission* (ATSIC) dalam menangani hal tersebut. ATSIC sendiri merupakan badan perwakilan nasional yang dipilih oleh masyarakat asli dan memiliki fungsi sebagai perwakilan dan administratif kebijakan peningkatan partisipasi Pribumi di sektor

publik (National Library of Australia 2022). Chesterman berpendapat jika ATSIC kurang dalam memberikan partisipasi kepada masyarakat asli sehingga ia menuliskan dalam penelitiannya jika ada tiga cara yang kemungkinan bisa membantu untuk memastikan peran Pribumi dalam proses pembuatan kebijakan, yaitu mengganti ATSIC dengan kebijakan khusus yang lebih kuat, memberikan kursi/tempat untuk perwakilan masyarakat asli di parlemen federal, serta pembentukan badan terpilih baru yang bertujuan untuk meninjau undang-undang tentang masyarakat asli. Penelitian Chesterman berbeda dengan penelitian milik penulis karena John lebih memfokuskan penelitiannya ke peran masyarakat asli dalam pembuatan kebijakan nasional masyarakat adat dan pembentukan badan perwakilan yang baru sebagai pengganti ATSIC yang sebelumnya gagal menangani hal tersebut.

Terakhir, ada penelitian dari University of New South Wales yang ditulis oleh Shireen Morris. Dalam penelitian ini, Shireen Morris membahas tentang cara-cara di mana suku Maori diakui melalui lembaga hukum dan politik Selandia Baru. Morris berpendapat bahwa pengakuan adat dapat terjadi tidak hanya melalui reformasi konstitusional, tetapi juga melalui reformasi kelembagaan dan legislatif. Contohnya pengakuan masyarakat asli di Selandia Baru yang dilakukan dengan cara pemerintah berupaya mengatasi hubungan fungsional dan hubungan kerja antara masyarakat asli dan negara, dengan tujuan membuatnya lebih adil dari sebelumnya (Morris 2014). Selain itu, Morris juga menggunakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Selandia Baru tentang masyarakat asli yang dinilai efektif untuk dapat ditiru dan diterapkan oleh pemerintah Australia dalam menghadapi tantangan pengakuan konstitusional masyarakat asli di Australia.

Penelitian dari Shireen Morris ini menjadi tinjauan utama penulis dengan perbedaan yang terletak di fokus pembahasan di mana penelitian penulis akan melakukan analisis tingkat keberhasilan penerapan kebijakan masyarakat asli antar kedua negara.

Berdasarkan dari ketiga literatur di atas, sudah cukup banyak penelitian yang membahas tentang penerapan kebijakan masyarakat asli di Australia dan Selandia Baru. Namun, belum ada dari penelitian terdahulu yang menganalisis apa yang menjadi alasan perbedaan penerapan kebijakan masyarakat asli di dua negara tersebut. Dengan menggunakan teori *Welfare Capitalism*, penelitian ini akan membahas mengenai penerapan kebijakan masyarakat asli di Australia dan Selandia Baru serta menyempurnakan kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6. Kerangka Pemikiran

Masih adanya kesenjangan antara pribumi dan non-pribumi seringkali mempertanyakan bagaimana upaya pemerintah Australia dan Selandia Baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli. Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan Teori *Welfare Capitalism* oleh Gøsta Esping-Andersen yang memiliki fokus analisis pada perbandingan mengenai sistem kesejahteraan di berbagai negara yang membaginya ke dalam tiga model negara kesejahteraan, yakni *Liberal Welfare State*, *Conservative Welfare State* dan *Universal Welfare State (Social-democratic)* (Esping-Andersen 1990). Model negara liberal menganggap peran pasar ideal untuk masyarakat dalam mencapai kesejahteraan (Esping-Andersen 1990). Jika layanan kesejahteraan tidak disediakan secara

publik, maka disediakan oleh pasar, tetapi dengan distribusi yang berbeda berdasarkan kebutuhan masyarakat. Negara sebagai penyedia layanan inti, namun masih bekerja sama dengan pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Esping-Andersen 1990).

Model negara konservatif melihat negara kesejahteraan bukan untuk kesetaraan, namun keamanan sehingga perlindungan sosial diberikan berdasarkan kinerja, kontribusi dan pekerjaan masyarakat (Esping-Andersen 1990). Model negara terakhir, yaitu universal. Sesuai dengan namanya, model negara universal menganut universalisme di mana elemen penting dari sistem kesejahteraan adalah semua masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial dari negara (Esping-Andersen 1990). Teori ini menjadi cocok untuk digunakan karena mencakup aspek-aspek kesejahteraan negara, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial hingga politik. Ada empat poin yang menjadi pilar utama dari Teori *Welfare Capitalism* yang dibagi ke dalam tiga kategori oleh setiap pilarnya di mana kategori pertama merujuk kepada model negara liberal, kategori kedua negara konservatif dan kategori ketiga negara universal. Empat variabel tersebut, yaitu:

1. *De-commodification*; sejauh mana upaya negara dalam mengurangi ketergantungan masyarakat pada pasar dengan menyediakan layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Esping-Andersen menilai de-komodifikasi melalui tiga hal, yakni *old-age pensions*, *sickness benefits*, dan *employment insurance* (Esping-Andersen 1990). Esping-Andersen membagi nilai de-komodifikasi ke dalam tiga tingkat, yakni *low* (rendah), *medium* (menengah) dan *high* (tinggi).

Tabel 3. Kategori Tingkat *De-Commodification*

Aspek	Low	Medium	High
Pensions	Negara tidak menyediakan tunjangan pensiun hari tua.	Negara menyediakan tunjangan pensiun hari tua dengan syarat.	Negara menyediakan tunjangan pensiun hari tua tanpa syarat dan merata.
Sickness	Negara tidak memberikan layanan dan tunjangan kesehatan.	Negara memberikan layanan dan tunjangan kesehatan, namun bersyarat dan belum tersebar secara adil.	Negara memberikan layanan dan tunjangan kesehatan secara adil dan menyeluruh kepada setiap warga negara.
Unemployment	Negara tidak/kurang membantu dalam memberikan lapangan pekerjaan.	Negara membantu memberikan wadah untuk membuka lapangan pekerjaan secara mandiri.	Negara memberikan lapangan pekerjaan kepada seluruh warga negara yang menganggur.

Sumber: Esping-Andersen (1990)

2. *Social rights*; sejauh mana hak-hak sosial mengizinkan masyarakat untuk menjadikan standar hidup mereka tidak bergantung pada pasar murni (*pure market forces*). *Social rights* menekankan pada bagaimana hak warga negara dalam memperoleh perlindungan sosial serta menghilangkan status warga negara sebagai “komoditas” (Esping-Andersen 1990). Pada bagian *social rights*, Esping-Andersen membagi ke dalam tiga kategori, yaitu *need based* (berdasarkan kebutuhan), *employment-related* (kontribusi pekerja) dan *universal* (adil dan merata).

Tabel 4. Kategori Aspek *Social Rights*

Aspek	Need Based	Employment-related	Universal
Social rights	Dukungan sosial berdasarkan skala prioritas di mana dilihat dari tingkat kecukupan finansial individu atau keluarga. Memenuhi hak sosial masyarakat berdasarkan kebutuhan, tanpa memandang kontribusi kepada negara.	Dukungan sosial yang berhubungan dengan lapangan pekerjaan. Negara menyediakan dukungan dan perlindungan bagi pekerja. Memenuhi hak sosial masyarakat melihat dari kebutuhan dan kontribusi mereka sebagai pekerja.	Dukungan sosial yang diberikan secara adil dan merata kepada masyarakat. Memenuhi hak sosial dengan meminimalkan kesenjangan dan ketidaksetaraan.

Sumber: Esping-Andersen (1990)

3. *Welfare provision*; upaya negara dalam menyediakan layanan perlindungan sosial untuk masyarakat secara merata dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Esping-Andersen juga mempertimbangkan bagaimana aktivitas negara saling terkait dengan peran pasar dalam penyediaan layanan sosial (Esping-Andersen 1990). Dalam variabel ini, Esping-Andersen membagi ke dalam tiga kategori, yakni *mixed services* (pemerintah dan swasta), *transfer payments* (tunjangan) dan *public services* (pemerintah).

Tabel 5. Kategori Aspek *Welfare Provision*

Aspek	Mixed Services	Transfer Payments	Public Services
Welfare provision	Penyediaan pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan atau bekerja sama dengan pihak swasta, contohnya seperti organisasi, perusahaan dan sebagainya.	Penyediaan pelayanan sosial melalui tunjangan-tunjangan dari pemerintah sebagai dukungan finansial bagi masyarakat yang membutuhkan.	Penyediaan pelayanan sosial yang disediakan penuh oleh pemerintah tanpa syarat dan tanpa kerja sama dengan pihak swasta.

Sumber: Esping-Andersen (1990)

4. *Benefits*; merujuk kepada manfaat dasar yang diberikan negara kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti bantuan keuangan, pelayanan kesehatan, tunjangan pensiun dan sebagainya secara setara (Esping-Andersen 1990). Sama seperti variabel yang lain, *benefits* juga dikategorikan ke dalam tiga bagian, yakni *flat benefits* (standar), *contribution-related* (kontribusi) dan *redistributive*.

Tabel 6. Kategori Aspek *Benefits*

Aspek	Flat Benefits	Contribution-related	Redistributive
Benefits	Negara memberikan manfaat sosial kepada masyarakat secara merata dalam jumlah yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat.	Negara memberikan manfaat sosial kepada masyarakat berdasarkan jumlah kontribusi finansial atau pekerjaan. Semakin besar kontribusi masyarakat kepada negara, semakin banyak pula manfaat yang diterima.	Negara memberikan manfaat sosial kepada masyarakat secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sumber: Esping-Andersen (1990)

Empat pilar penting dalam Teori *Welfare Capitalism* oleh Esping-Andersen akan menjadi variabel utama penulis dalam melakukan penelitian ini, namun akan lebih spesifik kepada analisis penerapan kebijakan masyarakat asli dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat asli di Australia dan Selandia Baru. Teori ini juga sejalan dengan penelitian penulis yang akan melakukan analisis terhadap sistem kerja pemerintah Australia dan Selandia Baru dalam hal penerapan kebijakan masyarakat asli melalui keempat pilar utama dalam *Welfare Capitalism*.

1.7. Argumen Sementara

Tingkat keberhasilan penerapan kebijakan masyarakat asli di Australia dan Selandia Baru pada masa pemerintahan Scott Morrison & Jacinda Ardern berbeda jika melihat dari keempat pilar teori *Welfare Capitalism*. Nilai *de-commodification* kebijakan masyarakat asli di Australia terletak pada nilai de-komodifikasi rendah di mana pemerintah Australia belum sepenuhnya bisa melepas ketergantungan pada pasar yang juga berkaitan dengan *welfare provision* Australia yang belum merata dalam menyediakan layanan sosial bagi penduduk asli. Selandia Baru di sisi lain terletak pada nilai *de-commodification* menengah dalam hal kebijakan masyarakat asli di mana *welfare provision* Selandia Baru lebih baik daripada Australia, namun belum sepenuhnya terlepas dari ketergantungan pasar. Kedua pilar tersebut berkesinambungan dengan pilar *benefits* di mana *benefits* Australia masuk dalam kategori *contributed-related* dan Selandia Baru di kategori *redistributive*. Pilar *social rights* antar kedua negara memiliki perbedaan melihat dari Australia yang belum bisa memberikan hak suara kepada penduduk asli sedangkan Selandia Baru selalu melibatkan penduduk suku Maori dan mengakui hak suara mereka.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri sangat sering digunakan oleh peneliti-peneliti Hubungan Internasional untuk menganalisis studi kasus yang sedang diteliti. Jenis penelitian dengan metode kualitatif menjadikan sumber literatur sebagai data utama.

1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah negara Australia dan Selandia Baru dengan objek penelitian adalah perbandingan penerapan kebijakan masyarakat asli pemerintah Australia dan Selandia Baru pada masa pemerintahan Scott Morrison dan Jacinda Ardern.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data dari data-data sekunder dan sumber-sumber literatur seperti buku, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan, serta artikel daring dari laman web yang aktual, terpercaya dan dapat divalidasi kebenarannya seperti Kompas, Kumparan, *Australian Embassy* hingga *National Library of Australia*.

1.8.4. Proses Penelitian

Proses penelitian akan dimulai dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan penerapan kebijakan masyarakat asli antara Australia dan Selandia Baru dari sumber literatur terpercaya seperti buku, jurnal, laporan maupun artikel yang diperoleh dari internet. Setelah itu, penulis akan melakukan pemilihan data yang lebih rinci agar dapat mengetahui mana sumber yang perlu dimasukkan dan tidak perlu dimasukkan. Kemudian, penulis akan mulai menyusun penelitian secara rapi dan tertata sesuai dengan panduan penulisan akademis.

1.9. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan memiliki sistematika pembahasan yang terbagi dalam 4 bab, yaitu:

- BAB 1: akan berisi tentang pendahuluan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, argumen sementara hingga metode penelitian.
- BAB 2: akan berisi mengenai analisis penerapan kebijakan masyarakat asli terhadap masyarakat asli di Australia menggunakan teori *Welfare Capitalism* dari Gøsta Esping-Andersen.
- BAB 3: akan berisi mengenai analisis penerapan kebijakan masyarakat asli terhadap masyarakat asli di Selandia Baru menggunakan teori *Welfare Capitalism* dari Gøsta Esping-Andersen.
- BAB 4: akan berisi penutup seperti kesimpulan, bagaimana solusi (jika ada) dan bagaimana keputusan akhir dari penelitian ini serta saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB 2

ANALISIS KEBIJAKAN MASYARAKAT ASLI DI AUSTRALIA

2.1. Tingkat *De-commodification* dalam Kehidupan Masyarakat Asli Australia

De-commodification atau de-komodifikasi merupakan salah satu pilar dalam mengukur sejauh mana kesejahteraan sebuah negara. Esping-Andersen menilai tingkat de-komodifikasi suatu negara melalui tiga aspek; *pensions*, *sickness* dan *unemployment* (Esping-Andersen 1990). Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison, terbentuk *National Indigenous Australians Agency* (NIAA) yang merupakan sebuah badan eksekutif yang berfokus terhadap masalah-masalah mengenai masyarakat asli (NIAA, n.d.). NIAA bertanggung jawab kepada Menteri Masyarakat Asli Australia yang berfungsi untuk memimpin dan mengkoordinasikan pengembangan kebijakan, perancangan dan implementasi program, pemberian layanan, penasehat perdana menteri dan menteri masyarakat asli hingga pemantauan dan evaluasi program yang berkaitan dengan masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres (Australian Government 2019). Terdapat sejumlah program inisiatif pemerintah Australia dalam penerapan kebijakan masyarakat asli di mana mencakup aspek yang digunakan oleh Esping-Andersen dalam menilai tingkat de-komodifikasi negara, yakni *Health and Wellbeing* dan *Employment*. Aspek *pensions* tidak termaktub dalam program khusus kebijakan masyarakat asli, namun mengikuti kebijakan pensiun negara secara umum (Australian Taxation Office 2023).

2.1.1. *Old-Age Pensions*

Aspek *old-age pensions* melihat dari seberapa besar manfaat/tunjangan pensiun yang diberikan pemerintah kepada warga negara yang bekerja (Esping-Andersen 1990). Kebijakan mengenai dana pensiun di Australia dikenal dengan *Superannuation* atau *Super Fund* (Australian Taxation Office 2023). *Superannuation* merupakan istilah dana pensiun dari Persemakmuran Inggris yang mengusung konsep tabungan masa depan dalam kerangka peraturan dan hukum pajak (Kingston and Thorp 2019). Sistem *superannuation* sendiri merupakan sistem dana pensiun pribadi yang wajib dibayarkan oleh majikan atau perusahaan kepada para pekerja melalui rekening tabungan (Australian Taxation Office 2023). Majikan atau perusahaan akan memberikan dana pensiun sebesar 10% dari upah pekerja per bulan dan dana pensiun dapat dicairkan ketika para pekerja telah berusia 65 tahun atau ketika mengalami kondisi yang sulit sesuai dengan syarat yang telah ditentukan pemerintah (Australian Taxation Office 2023). Hal ini berlaku bagi seluruh warga negara Australia yang bekerja, termasuk penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres.

Belum ada kebijakan khusus masyarakat asli yang mengatur mengenai dana pensiun. Untuk itu, agar masyarakat asli juga dapat merasakan tunjangan pensiun, pemerintah Australia berupaya membukakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya melalui program *employment*. Aspek pensiun oleh pemerintah kepada masyarakat asli masuk ke dalam kategori *medium* di mana pemerintah memberikan tabungan dana pensiun yang memerlukan beberapa syarat, seperti harus bekerja dan dapat diambil ketika sudah mencapai usia

tertentu. Australia belum benar-benar memfasilitasi dana pensiun tanpa syarat dan merata, namun juga bukan yang tidak memberikan dana pensiun sama sekali.

2.1.2. *Sickness Benefits*

Dalam penerapan kebijakan masyarakat asli, aspek *sickness benefit* tertuang dalam program *Health and Wellbeing*. Menurut hasil studi dari *Commonwealth Fund*, Australia menduduki peringkat ketiga dengan sistem pelayanan kesehatan terbaik di dunia (Schneider et al. 2021). Meski demikian, hal tersebut tidak dapat menjamin jika seluruh masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang memadai, terlebih lagi oleh masyarakat asli di Australia. Dilansir dari *Closing the Gap Report 2020*, kesehatan masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres masih relatif buruk dikarenakan akses layanan kesehatan masih belum merata. Penduduk asli Aborigin dan Selat Torres diduga mengalami tingkat akses layanan kesehatan yang paling tidak adil dibandingkan dengan penduduk asli lainnya di dunia (Larke et al. 2021). Seperti janji yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri Scott Morrison jika dia akan memaksimalkan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat asli, salah satunya dengan cara membentuk kemitraan yang disebut *Coalition of Peaks on Closing the Gap* (Australian Government 2020).

Closing the Gap merupakan program pemerintah Australia yang telah diusung sejak tahun 2005 dan bertujuan untuk menutup kesenjangan bagi penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres (Australian Government 2020). Pada 2019, terbentuk kemitraan antara pemerintah Australia dengan koalisi puncak organisasi Aborigin dan Kepulauan Selat Torres (*Coalition of Peaks*) yang

menghasilkan perjanjian yang disebut *National Agreement on Closing the Gap* di tahun 2020 (Australian Government 2020). Perjanjian tersebut berisi tentang harus dilibatkannya masyarakat asli dalam penyusunan dan pemantauan program-program *Closing the Gap* milik pemerintah (Parliament of Australia, n.d.). Perjanjian ini mengantarkan kepada peningkatan program-program *Closing the Gap* di berbagai bidang, termasuk pada bidang kesehatan. Salah satunya adalah diadakannya *Health Check* yang berisi tentang keharusan dalam melibatkan tenaga kesehatan masyarakat Aborigin dan/atau Kepulauan Selat Torres untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan tujuan memantau jalannya program kesehatan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat asli (Hoffman 2020).

Meskipun terjadi beberapa perjanjian kemitraan dalam program *Closing the Gap*, kesehatan masyarakat asli yang memprihatinkan masih harus dijadikan prioritas oleh pemerintah, khususnya dalam mengakses layanan kesehatan seperti fasilitas rumah sakit yang memadai serta dokter/tenaga kesehatan yang ahli dan tidak rasis. Salah satu kasus terjadi kepada seorang wanita Aborigin yang kehilangan nyawanya ketika sedang mengandung dikarenakan dia tidak mendapat rujukan ke spesialis mana pun, bahkan perawat di rumah sakit setempat menganggap dia sebagai pecandu dan berbohong tentang rasa sakitnya (Gatwiri, Rotumah, and Rix 2021). Wanita tersebut meninggal 15 jam setelah diberikan dua tablet parasetamol karena *septikemia meningokokus* atau infeksi dalam saluran darah (Gatwiri, Rotumah, and Rix 2021). Hal ini juga terbukti dari laporan *Closing the Gap* yang menuliskan jika di tahun 2018, sekitar 117 anak pribumi

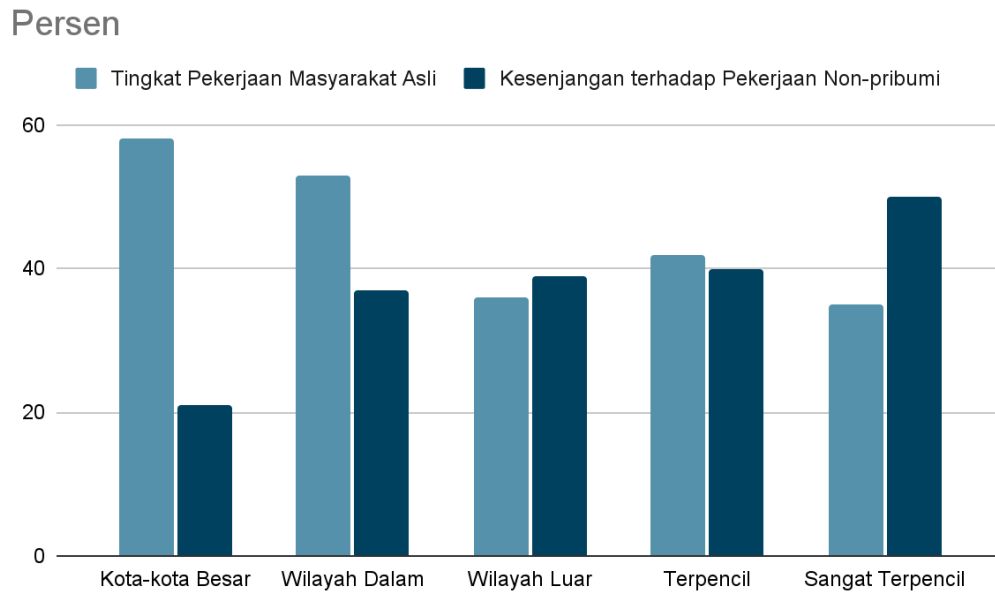
meregang nyawa dikarenakan alasan kesehatan sang ibu saat mengandung (Australian Government 2020).

Peristiwa tersebut menunjukkan jika layanan dan tunjangan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat asli masih belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Untuk itu, aspek kesehatan bagi masyarakat asli termasuk ke dalam kategori *medium* di mana pemerintah Australia sudah memberikan layanan dan tunjangan kesehatan yang harus memenuhi beberapa syarat. Namun, sistem kesehatan belum dapat dirasakan secara adil karena masih ditemukannya penduduk suku Aborigin yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan yang memadai di negara kangguru tersebut.

2.1.3. Employment Insurance

Aspek *employment insurance* terdapat dalam program *employment*. Ketidaksetaraan dalam pekerjaan masih dapat ditemui di Australia. Sektor lapangan pekerjaan bagi penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan masyarakat non-pribumi. Isu dalam bidang ekonomi masih menjadi tantangan terbesar pemerintah Australia dalam membawa masyarakat asli menuju hidup yang lebih sejahtera.

Grafik 1. Tingkat Kesenjangan Lapangan Kerja Usia 15-64 Tahun Berdasarkan Keterpencilan, 2018-2019



Sumber: Closing the Gap Report (2020)

Dari grafik di atas, dapat dilihat jika masih ada kesenjangan lapangan pekerjaan antara masyarakat asli dan non-pribumi, terutama di daerah-daerah terpencil. Dilansir dari laporan *Closing the Gap*, bunuh diri menjadi penyebab kematian kelima di kalangan penduduk asli Australia pada tahun 2020, menyumbang 5,5% dari seluruh kematian karena dipicu oleh permasalahan ekonomi (Australian Government 2020). Program *employment* memberikan layanan ketenagakerjaan di daerah terpencil Australia di bawah *Community Development Program* (CDP) yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran masyarakat asli (Australian Government 2022). Pemerintah Australia cenderung fokus pada penyediaan wadah untuk membantu mengembangkan usaha dan bisnis milik masyarakat asli guna mendukung pemerataan akses terhadap peluang pasar dan meningkatkan keamanan finansial bagi keluarga dan komunitas masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres.

Di antara semua program yang menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat asli, bisa dikatakan jika program ketenagakerjaan merupakan program yang menjadi prioritas dan berjalan cukup baik dalam membawa perubahan bagi kehidupan sosial penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. Pemerintah Australia selalu mengusahakan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan di sektor pekerjaan bagi masyarakat asli. Contohnya seperti ketika dilakukannya tinjauan terhadap Undang-Undang CATSI (*The Corporations Aboriginal and Torres Strait Islander*) yang merupakan undang-undang federal di Australia yang mengatur korporasi milik masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres pada bulan Desember 2019 (Australian Government 2020). Tujuannya untuk membukakan lebih banyak peluang bagi perusahaan-perusahaan milik masyarakat asli dalam pembangunan ekonomi serta diharapkan dapat menguntungkan lebih dari 3.000 perusahaan Aborigin dan Kepulauan Selat Torres di seluruh negeri. Tak hanya itu, laporan *Closing the Gap* di tahun 2022 juga menunjukkan bahwa pada 30 Juni 2022, jumlah masyarakat asli yang mencari kerja turun menjadi 91.059 di mana setahun sebelumnya terdapat 101.549 pencari kerja.

Upaya yang dilakukan pemerintah Australia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat asli di bidang ekonomi terus membawa perubahan, meskipun tidak signifikan. Ketika masa pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison, Australia bergabung dalam *Indigenous People Economic and Trade Cooperation Arrangement* (IPETCA). IPETCA sendiri merupakan sebuah bentuk perjanjian kerja sama ekonomi yang tidak mengikat dengan tujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat asli melalui pendekatan

perdagangan yang inklusif (Australian Government 2020). Inisiatif IPETCA dikembangkan oleh Selandia Baru bersama negara-negara *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) sejak Februari 2021 yang kemudian Kanada, Australia dan Taiwan bergabung menjadi bagian dari anggota pendiri IPETCA pada Bulan Desember di tahun yang sama (Ace Consulting 2022). Bergabungnya Australia dalam IPETCA merupakan salah satu layanan pengembangan bisnis bagi masyarakat asli serta program untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat dalam perdagangan sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memajukan rekonsiliasi dan pemberdayaan ekonomi penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. Upaya yang dilakukan Scott Morrison sedikit banyaknya bisa membantu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat asli agar dapat mandiri dan meminimalisir ketergantungan pada pasar.

Meskipun dari ketiga aspek dekomodifikasi yang bisa dikatakan lebih menonjol adalah aspek *unemployment*, namun aspek ini juga masih berada dalam kategori *medium*. Hal ini dikarenakan pemerintah belum sepenuhnya mampu memberikan pekerjaan kepada semua masyarakat asli yang menganggur, tetapi upaya dalam memberikan wadah untuk membangun bisnis mandiri bagi penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres sudah dapat dikatakan baik. Melihat dari ketiga aspek tersebut, tingkat dekomodifikasi masyarakat asli di Australia masuk ke dalam kategori menengah yang sesuai dengan definisi *de-commodification* itu sendiri jika pemerintah sudah berupaya memberikan fasilitas, namun belum sepenuhnya bisa lepas dari peran pasar.

2.2. Pemenuhan *Social Rights* Masyarakat Asli di Australia

Pada pilar kedua, Esping-Andersen menuliskan *social rights* atau hak-hak sosial sebagai salah satu faktor utama dalam membangun negara kesejahteraan. Hak-hak sosial yang dimaksud dalam hal ini berupa adanya perlindungan sosial yang negara berikan kepada masyarakat secara adil dan setara (Esping-Andersen 1990). Seperti yang diketahui, penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres sebagai masyarakat asli di Australia sudah berjuang sejak lama untuk mendapatkan keadilan dan pengakuan di tanah kelahiran mereka. Sudah banyak sekali usaha yang dilakukan dengan tujuan membawa masyarakat asli menuju hidup yang lebih sejahtera. Kondisi sosial suatu kelompok masyarakat menjadi hal penting dalam membangun standar hidup yang lebih baik. Dalam program NIAA, terdapat fokus pada bidang keamanan komunitas dengan tujuan untuk mengurangi bentuk-bentuk kejahatan, seperti pelecehan, penelantaran anak, kekerasan dan sebagainya agar masyarakat asli dapat menjalani kehidupan yang aman (NIAA, n.d.). Selain itu, hak dalam memperoleh pendidikan yang layak serta upaya pengakuan hak suara masyarakat asli juga tertuang dalam program NIAA.

Program *Closing the Gap* sebagai sebuah program utama pemerintah Australia juga mencakup tentang peningkatan terhadap akses pendidikan bagi masyarakat asli. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison, program tersebut berhasil membuat banyak siswa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres yang melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Dilansir dari *Commonwealth Closing the Gap Annual Report 2022*, terjadi peningkatan sebanyak 10,8% (295) siswa yang dapat mengakses hingga ke perguruan tinggi

pada bulan Maret 2022 di mana hanya ada 10,5% (260) saja di tahun sebelumnya. Tetapi, hal tersebut tidak membuat pemerintah Australia telah sepenuhnya berhasil menghapus kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat asli. Dilansir dari laman web NIAA, tertulis jika masih banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah Australia dalam menciptakan pendidikan yang adil bagi masyarakat asli. Kurangnya kehadiran dan keterlibatan siswa suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres di sekolah merupakan salah satu hal yang perlu dipikirkan.

Kesenjangan kehadiran siswa yang semakin melebar antara masyarakat asli dan non-pribumi dipicu oleh trauma masa lalu yang masih berbekas dalam ingatan para masyarakat asli. Trauma tersebut disebabkan oleh peristiwa kelam *Stolen Generation* yang merupakan sebutan terhadap kebijakan penertiban Australia di mana pemerintah mengambil secara paksa anak-anak tersebut dari orang tua mereka yang kemudian mereka akan diberikan edukasi mengenai gaya hidup orang putih (Gilbert 2019). Peristiwa ini membuat banyak masyarakat berspekulasi jika yang dilakukan oleh pemerintah Australia saat itu merupakan bentuk pembersihan budaya (Gilbert 2019). Peristiwa *Stolen Generation* ini menjadi fokus utama pemerintah Australia selama bertahun-tahun.

Selain hak pendidikan, masyarakat asli juga memiliki hak untuk diakui suaranya dalam politik. Pada tahun 2019, Perdana Menteri Scott Morrison mengakui bahwa pemerintah Australia telah gagal dalam memenuhi hak dan upaya emansipasi terhadap masyarakat asli (Alexandra and Daniah 2020). Scott Morrison mengatakan akan meneruskan janji dua Perdana Menteri sebelumnya, yakni Julia Gillard dan Tony Abbott untuk memberikan pengakuan atas hak-hak masyarakat asli termasuk hak konstitusional mereka dalam konstitusi (Alexandra

and Daniah 2020). Saat itu, Scott Morrison berencana untuk melakukan referendum perubahan konstitusi terkait masyarakat asli pada tahun 2022 (Rahman 2019). Namun, hingga Scott Morrison lengser dari jabatannya sebagai Perdana Menteri di tahun 2022, referendum tersebut tidak terlaksana dan baru terealisasi setahun kemudian ketika masa pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese. Hal ini menunjukkan jika pemenuhan hak-hak sosial masyarakat asli belum menunjukkan adanya sifat yang universal. Pengakuan hak suara penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dalam konstitusi menjadi hal yang penting. Masyarakat asli berpikir bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ada saat ini belum cukup untuk membawa perubahan dalam kehidupan mereka sehingga perlu diadakan referendum (ABC Australia 2022). Sayangnya, hingga hari ini, hak konstitusional masyarakat suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres belum juga mendapat pengakuan dikarenakan referendum yang tidak berhasil.

Hal tersebut memperlihatkan jika pemenuhan hak-hak sosial masyarakat asli di Australia berada dalam kategori *need based* yang merujuk pada skala prioritas negara dan tidak menilai dari kontribusi atau kinerja. Pemerintah Australia memenuhi hak sosial masyarakat asli berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini terlihat pada fokus pemerintah dalam mengurangi kesenjangan kehadiran siswa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres di sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Di sisi lain, pelajar yang melanjutkan ke pendidikan tinggi menjadi sedikit karena adanya skala prioritas tersebut. Namun, pada masa Scott Morrison, pemerintah juga belum mampu memenuhi hak demokratis masyarakat asli karena referendum tidak terlaksana.

2.3. Penyediaan *Welfare Provision* untuk Masyarakat Asli oleh Australia

Pilar ketiga, *welfare provision* adalah sebuah penyediaan layanan kesejahteraan oleh negara atau lembaga publik untuk masyarakat (Esping-Andersen 1990). Penyediaan layanan kesejahteraan yang dimaksud dalam hal ini meliputi berbagai program dan kebijakan sosial seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Hampir mirip dengan *social rights*, namun yang membedakan adalah *welfare provision* berbicara tentang bagaimana negara memfasilitasi hak-hak sosial masyarakatnya dengan menyediakan layanan kesejahteraan, baik dari pemerintah maupun pihak swasta (Esping-Andersen 1990). Pada dasarnya, penyediaan layanan sosial erat kaitannya dengan de-komodifikasi. Esping-Andersen membedakannya dengan memfokuskan pilar *welfare provision* dalam keterlibatan penyediaan layanan sosial oleh pemerintah, pihak swasta atau keduanya (Esping-Andersen 1990). Dalam program NIAA, keterlibatan pemerintah dan pihak swasta lebih banyak tercantum dalam bidang pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan dalam sektor perekonomian menjadi hal yang mengakar bagi masyarakat asli di Australia. Kurangnya pendapatan dan lapangan pekerjaan bagi penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres menciptakan berbagai cabang masalah, mulai dari masalah kesehatan hingga berpengaruh dalam rendahnya tingkat harapan hidup masyarakat asli (Ring and Griffiths 2021). Oleh karena itu, banyak program dalam NIAA yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi masyarakat asli dan membuahkan hasil yang lebih memuaskan daripada program lain yang tidak berkaitan dengan bidang ekonomi. Dilansir dari web NIAA, pada seksi fokus area *land and housing*, terdapat pembahasan tentang

economic independence and self-determination di mana pemerintah Australia menyatakan mendukung *Indigenous self-determination* dengan memaksimalkan kemandirian ekonomi masyarakat asli agar dapat mewujudkan impian mereka untuk memiliki rumah dan menjalankan bisnis sendiri (Australian Government 2020). Salah satunya melalui *Indigenous Procurement Policy* (IPP) yang memiliki tujuan untuk menstimulasi kewirausahaan, pengembangan bisnis dan ekonomi masyarakat asli, sehingga memberikan lebih banyak peluang bagi penduduk asli Australia untuk berpartisipasi dalam perekonomian (Australian Government 2020). Pemerintah Australia menggunakan IPP untuk mendorong pihak swasta memberikan pelatihan, lapangan pekerjaan dan peluang bisnis bagi masyarakat asli (Denny-Smith, Williams, and Loosemore 2020).

Keberhasilan IPP diukur dari melihat seberapa banyak peningkatan jumlah nilai kontrak yang diberikan kepada bisnis milik masyarakat asli. Pada tahun 2021, IPP telah membantu memberikan lebih dari \$5,3 miliar kontrak kepada 2.603 bisnis milik masyarakat asli, dengan rata-rata \$850 juta per tahun selama enam tahun terakhir, dibandingkan dengan hanya \$6,2 juta pada tahun sebelum IPP, yakni 2014 hingga 2015 (NIAA 2021). Kontrak-kontrak ini mencakup berbagai industri termasuk teknologi informasi, layanan kesehatan, konsultasi, pendidikan dan telekomunikasi. Pada tahun 2015, pemerintah hanya memiliki 19 kontrak dengan bisnis masyarakat asli senilai \$4,2 juta di sektor teknologi informasi, namun pada tahun 2020-2021, jumlah ini meningkat menjadi 402 kontrak senilai \$54 juta (NIAA 2021). Selain itu, pemerintah Australia juga menyediakan bantuan pendanaan *Indigenous Advancement Strategy* (IAS) yang merupakan cara pemerintah mendanai dan melaksanakan berbagai program bagi

penduduk asli (NIAA 2021). Melalui IAS, pemerintah Australia berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat asli dalam perekonomian sehingga mereka dapat merasakan hidup yang lebih sehat dan aman.

Selain dalam sektor ekonomi, penyediaan layanan kesejahteraan terhadap perlindungan sosial juga mencakup dalam bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan. Masih kurangnya keterwakilan pelajar Aborigin dan Kepulauan Selat Torres mendorong pemerintah Australia untuk melakukan sejumlah strategi dalam mendukung pendidikan masyarakat asli (Benton, Hearn, and Marmolejo-Ramos 2021). Pada tahun 2021, pemerintah Australia berkomitmen untuk membantu pembentukan *National Aboriginal and Torres Strait Islander Education Council* (NATSIEC) yang mempunyai tujuan mengidentifikasi dan memberikan saran mengenai hambatan yang dihadapi siswa, serta memberikan suara yang representatif mengenai masalah pendidikan yang berkaitan dengan siswa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres (Australian Government 2022). Pemerintah Australia bekerja sama dengan komunitas Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dalam memfasilitasi pendidikan anak-anak masyarakat asli, seperti menawarkan beasiswa, bantuan tutorial dan jenis bantuan lainnya agar masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas (Benton, Hearn, and Marmolejo-Ramos 2021).

Dalam penyediaan layanan kesehatan, pemerintah Australia menyalurkan dana sebesar \$459 juta kepada 134 layanan kesehatan yang ditangani oleh komunitas Aborigin pada tahun 2021-2022 (Australian Government 2022). Tak hanya itu, pemerintah juga menginvestasikan dana senilai \$22,6 juta untuk menjalankan program pemberian insentif kesehatan tindak lanjut penyakit kronis

terhadap masyarakat asli serta mendorong peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres (Australian Government 2022). Pemerintah Australia melalui program *Closing the Gap* banyak melakukan kolaborasi dengan komunitas Aborigin dan Kepulauan Selat Torres di sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan (Green et al. 2020). Hal ini menunjukkan jika penyediaan layanan kesejahteraan bagi masyarakat asli masuk ke dalam kategori *mixed services* di mana pemerintah masih melibatkan sektor swasta atau LSM. Pemerintah Australia belum menyediakan penuh pelayanan sosial dari negara, juga tidak semata-mata hanya memberikan tunjangan sebagai bantuan finansial kepada masyarakat asli.

2.4. Pemberian *Benefits* oleh Australia bagi Masyarakat Asli

Pilar terakhir dalam membangun negara kesejahteraan menurut Esping-Andersen adalah *benefits* atau manfaat. *Benefits* atau manfaat dalam hal ini merupakan faktor paling akhir untuk mengukur tingkat kesejahteraan sebuah negara. Seberapa banyak manfaat yang bisa diberikan negara kepada masyarakat sebagai sistem perlindungan sosial dan seberapa jauh program-program pemerintah menawarkan manfaat atau tunjangan yang adil, tanpa mengukur dari pendapatan, kontribusi maupun pekerjaannya (Esping-Andersen 1990). Mengutip hasil dari penelitian Esping-Andersen, dia mengatakan bahwa manfaat atau *benefits* hampir seluruhnya bergantung pada kontribusi dan pekerjaan masyarakat (Esping-Andersen 1990). *Benefits* menjadi pilar terakhir dalam teori *Welfare Capitalism* karena nilai manfaat dilihat dari ketiga pilar sebelumnya, yakni *de-commodification*, *social rights* dan *welfare provision*. Manfaat terbagi ke

dalam tiga kategori, yakni standar, kontribusi dan redistributif (Esping-Andersen 1990).

Sama seperti *old-age pensions*, fokus pemberian manfaat sosial yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres tidak dibedakan dalam kebijakan khusus, melainkan mengikuti peraturan negara secara umum (Sainsbury and Breunig 2020). Selain tunjangan pensiun, Australia juga memberikan beberapa macam tunjangan lain, seperti *Disability Support Pension* yang diperuntukkan warga negara yang mengalami kecacatan atau keterbatasan sehingga menghalangi mereka bekerja, tunjangan *newstart* untuk warga negara yang sedang mencari pekerjaan, serta tunjangan untuk keluarga yang berpenghasilan rendah dan menengah (Sainsbury and Breunig 2020). Ada juga tunjangan yang khusus diperuntukkan bagi kelompok masyarakat asli, seperti *Aboriginal Child Care Benefit* dan *Remote Area Allowance*, namun tidak ada perbedaan dalam pengaplikasian pemberian manfaatnya (Sainsbury and Breunig 2020). Dalam penerapan kebijakan masyarakat asli berdasar dari ketiga pilar sebelumnya, upaya pemerintah Australia, khususnya pada masa jabatan Perdana Menteri Scott Morrison lebih fokus terhadap penyediaan wadah jaminan sosial yang dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masing-masing individu.

Tabel 7. Analisis Teori *Welfare Capitalism* dalam Penerapan Kebijakan Masyarakat Asli di Australia

Variabel	Hasil	Keterangan
De-commodification	Medium	Melihat dari ketiga aspek, yakni <i>pensions</i> , <i>sickness</i> dan <i>unemployment</i> , pemerintah Australia telah memberikan tunjangan dan wadah bagi masyarakat asli meskipun belum sepenuhnya terlepas pada peran pasar.
Social rights	Need based	Pemerintah Australia memberikan perlindungan yang berdasarkan pada skala prioritas untuk masyarakat yang lebih membutuhkan, dalam hal ini penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. Namun, belum tersebar secara adil dan menyeluruh.
Welfare provision	Mixed services	Pemenuhan layanan kesejahteraan sudah disediakan oleh pemerintah Australia, namun masih membuka kerja sama dengan pihak swasta, khususnya dalam bidang ekonomi.
Benefits	Contribution-related	Pemberian manfaat atau tunjangan bagi masyarakat asli mengacu pada kontribusi dan/atau pekerjaan, di mana penduduk asli yang memiliki kontribusi lebih akan memperoleh manfaat yang lebih pula.

Sumber: Esping-Andersen (1990)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemberian manfaat sosial pemerintah Australia kepada masyarakat asli berada pada kategori *contribution-related* yang melihat pada kontribusi atau pekerjaan masyarakat asli. Pemberian bantuan melalui IAS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menawarkan manfaat atau tunjangan kepada masyarakat asli, meskipun harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan yang berkaitan dengan kontribusi kepada negara (NIAA 2021a). Dalam pemenuhan hak-hak sosial, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, manfaat yang diterima oleh masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres masih sangat memerlukan perhatian yang lebih. Segala upaya serta program-program mengenai kedua aspek tersebut, baik yang telah terlaksana maupun yang masih berbentuk rencana pada masa pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison memerlukan banyak evaluasi.

Akan tetapi, hal yang paling penting yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah Australia adalah hak suara mereka. Dari sekian banyak hal yang diupayakan pemerintah Australia untuk masyarakat asli, upaya pengakuan hak suara penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres menjadi satu-satunya yang belum pernah berhasil diwujudkan sampai detik ini. Padahal, desakan untuk menggelar referendum *Voice of Parliament* telah diserukan kepada pemerintah Australia sejak tahun 2017 (ABC Australia 2022). Namun, referendum baru bisa dilaksanakan pada tahun 2023 dan sayangnya masih belum membuahkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat asli. Penyediaan layanan serta akses sosial yang belum merata terhadap masyarakat asli menjadikan manfaat yang diperoleh masih sangat minim dan hanya bisa dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

BAB 3

ANALISIS KEBIJAKAN MASYARAKAT ASLI DI SELANDIA BARU

3.1. Tingkat *De-commodification* dalam Kehidupan Masyarakat Asli Selandia Baru

Sebagai negara tetangga Australia, Selandia Baru memiliki banyak persamaan dengan negara tersebut. Mulai dari bentuk pemerintahan, letak wilayah geografis hingga adat dan budayanya. Permasalahan mengenai kesenjangan antara penduduk suku Maori dan non-Maori juga masih menjadi tantangan bagi pemerintah Selandia Baru. Adanya kritik dari penduduk Maori kepada pemerintah terhadap banyak aspek membuat Pengadilan Waitangi mengatakan jika pemerintah Selandia Baru kerap melanggar perjanjian yang tertulis dalam Te Tiriti o Waitangi. Hal ini memicu Perdana Menteri Jacinda Ardern membuat program-program yang dapat meminimalisir kesenjangan antara masyarakat asli dan non-pribumi, salah satunya mendirikan Otoritas Kesehatan Maori atau Te Aka Whai Ora dengan tujuan menciptakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi penduduk suku Maori. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan penerapan kebijakan masyarakat asli di Australia dan Selandia Baru, perlu untuk melihat aspek *pensions*, *sickness* dan *unemployment* dari negara kiwi tersebut.

3.1.1. *Old-Age Pensions*

Aspek *old-age pensions* bagi masyarakat asli di Selandia Baru mengikuti peraturan pensiun negara secara umum. Sistem pensiun di Selandia Baru hampir mirip dengan Australia mengingat kedua negara tersebut merupakan bagian dari

Persemakmuran Inggris. Selandia Baru menetapkan tarif pensiun publik berdasarkan tes tempat tinggal dan persyaratan usia (OECD 2023). Warga negara yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan tunjangan pensiun harus sudah menetap di Selandia Baru setidaknya selama 10 tahun sejak berusia 20 tahun dan setidaknya 5 tahun setelah berusia 50 tahun (OECD 2023). Sama seperti Australia, dana pensiun akan dibayarkan ketika warga negara telah berusia 65 tahun. Namun, sistem pensiun publik milik Selandia Baru, *New Zealand Superannuation* (NZS) bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial, bukan untuk menggantikan pendapatan warga negara (OECD 2023).

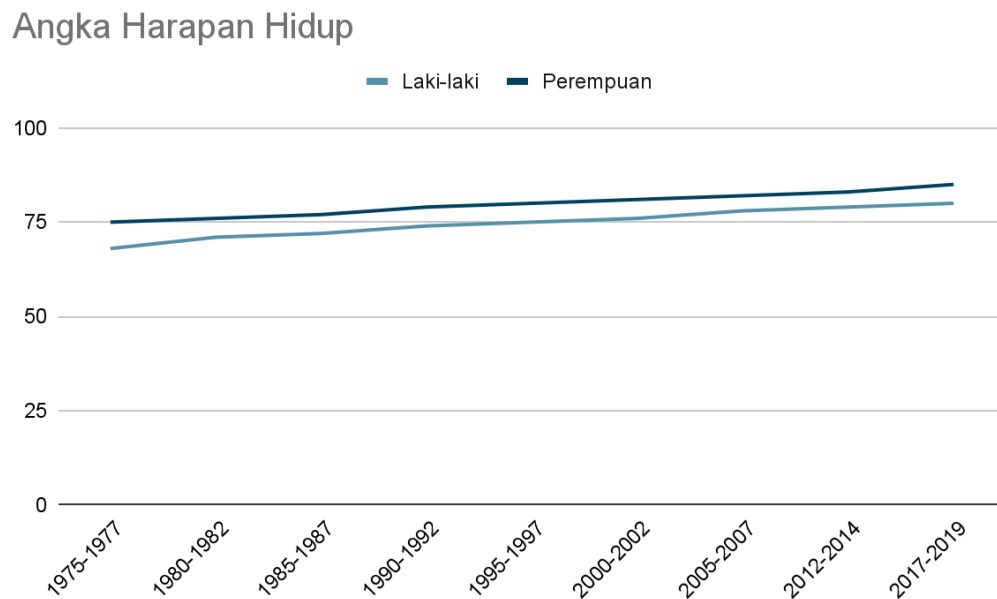
Selain NZS, Selandia Baru juga mempunyai dua sistem pensiun lainnya, yakni pensiun kerja melalui skema KiwiSaver dan skema pensiun mandiri. KiwiSaver merupakan tabungan sukarela berbasis pekerjaan untuk membantu meningkatkan tabungan pensiun pekerja di mana pemberi kerja harus membayar iuran sebesar 4% atau 8% dari total gaji kotor pekerja (OECD 2023). Para pekerja baru akan otomatis terdaftar dan memiliki waktu 8 minggu untuk memutuskan jika mereka ingin melanjutkan mengikuti tabungan di KiwiSaver atau tidak (OECD 2023). Pekerja yang memutuskan untuk tidak mengikuti skema KiwiSaver masuk ke dalam kategori skema pensiun mandiri. Sistem pensiun yang diterapkan Selandia Baru sangat beragam sehingga masyarakat mempunyai opsi dalam memilih bagaimana tunjangan pensiun mereka bekerja. Dengan adanya sistem pensiun NZS ini menunjukkan jika pemerintah Selandia Baru begitu mementingkan perlindungan sosial bagi warga negaranya. Melihat dari aspek tersebut, Selandia Baru termasuk dalam kategori *medium* dengan menyediakan tunjangan pensiun hari tua yang harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan.

3.1.2. Sickness Benefits

Meskipun sekilas terlihat jika hidup masyarakat asli di Selandia Baru lebih baik, namun penduduk suku Maori juga masih seringkali menuntut hak-hak mereka. Masyarakat asli suku Maori menghadapi kesenjangan kesehatan jika dibandingkan dengan masyarakat non-Maori. Tingkat kematian menunjukkan bahwa penduduk suku Maori cenderung akan mengalami kematian 7 hingga 8 tahun lebih muda dibandingkan dengan masyarakat non-pribumi (Barton 2018). Permasalahan dalam mengakses layanan kesehatan primer menjadi tantangan bagi masyarakat asli. Masalah rasisme dalam sistem kesehatan di Selandia Baru juga dirasakan oleh penduduk suku Maori di mana mereka lebih mungkin mengalami pelayanan medis yang merugikan dan kualitas yang buruk (Barton 2018). Untuk itu, pemerintah Selandia Baru mengusung beberapa program untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat suku Maori.

Pada tahun 2019, Pengadilan Waitangi menyebutkan bahwa pemerintah Selandia Baru telah melanggar Perjanjian Waitangi dikarenakan gagal merancang dan mengelola sistem layanan kesehatan yang ada untuk mengatasi kesenjangan terhadap suku Maori (Sheridan et al. 2024). Di tahun 2020, sekitar 43,6% masyarakat suku Maori melaporkan jika kebutuhan layanan kesehatan mereka tidak terpenuhi dan sebagian besar disebabkan oleh masalah biaya (Sheridan et al. 2024).

Grafik 2. Angka Harapan Hidup Penduduk Selandia Baru Terus Meningkat



Sumber: New Zealand Statistics (2021)

Grafik di atas menunjukkan jika angka harapan hidup penduduk Selandia Baru terus meningkat, termasuk masyarakat suku Maori. Namun, meski terus terjadi peningkatan, kesenjangan masih terlihat antara penduduk suku Maori dan non-Maori. Pada tahun 2017-2019, kesenjangan angka harapan hidup masyarakat asli dan non-pribumi saat lahir mencapai 7,5 tahun untuk laki-laki dan 7,3 tahun untuk perempuan (New Zealand Government 2021). Hal ini menjadi fokus utama pemerintah Selandia Baru untuk mengupayakan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai.

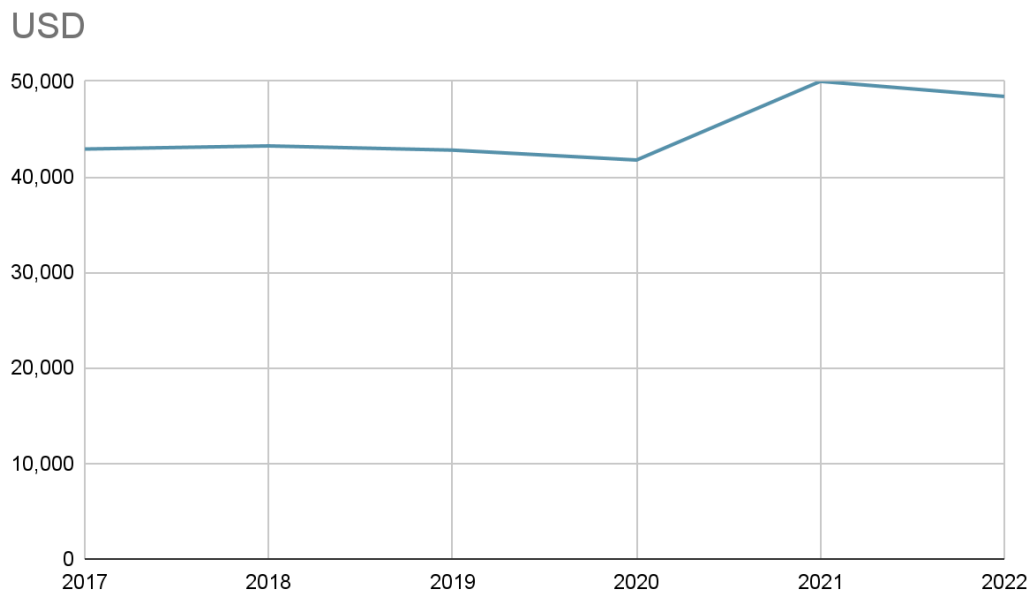
Dalam upaya meningkatkan sistem kesehatan yang lebih baik untuk penduduk suku Maori, pemerintah Selandia Baru membuat rencana kesehatan sementara, Te Pae Tata pada tahun 2022 dengan tujuan mengatur ulang sementara sistem kesehatan agar menciptakan layanan kesehatan yang adil, inklusif dan berdasarkan Te Tiriti o Waitangi (Health New Zealand and Māori Health

Authority 2022). Hal ini diusung oleh *Health New Zealand* yang bekerja sama dengan *Maori Health Authority* dan Menteri Kesehatan Selandia Baru. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah mengambil tindakan seperti mendesain kembali sistem kesehatan primer agar masyarakat suku Maori tidak terhambat dalam mengakses layanan kesehatan, melibatkan penduduk Maori dalam pengambilan keputusan hingga mendanai sistem kesehatan secara adil bagi masyarakat asli (Health New Zealand and Māori Health Authority 2022). Dalam aspek kesehatan, Selandia Baru masuk ke dalam kategori *medium* di mana pemerintah telah memberikan layanan serta bantuan kesehatan kepada masyarakat asli, tetapi belum dapat menjangkau seluruh penduduk Maori secara merata.

3.1.3. Employment Insurance

Sebagai negara maju, pendapatan ekonomi Selandia Baru merupakan salah satu pendapatan negara yang cukup besar di dunia. Pada awal masa pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern di tahun 2018, pendapatan per kapita Selandia Baru mencapai \$43,236 di mana pada tahun sebelumnya berada di angka \$42,911 (The World Bank, n.d.). Namun, perlu diingat bahwa pada saat Jacinda Ardern menjabat sebagai Perdana Menteri, dunia sedang mengalami masalah besar, yakni pandemi Covid-19. Ketika pandemi melanda, seperti negara-negara yang lain, Selandia Baru juga menghadapi tantangan di bidang ekonomi.

Grafik 3. GDP Per Capita Selandia Baru Tahun 2017-2022



Sumber: The World Bank (2024)

Grafik di atas menunjukkan jika terjadi penurunan pendapatan di tahun 2019-2020, namun juga terjadi peningkatan yang cukup besar di tahun 2021. Pada tahun 2020, pendapatan per kapita turun menjadi \$41,760 yang mana berjumlah \$42,796 di tahun sebelumnya (The World Bank, n.d.). Pemerintah Selandia Baru sempat mengalami kesulitan dalam menavigasi tantangan ketika dan setelah pandemi, di mana terjadi peningkatan biaya hidup dan memburuknya kesenjangan sosial (Wong 2023). Suku Maori sebagai kelompok rentan sangat merasakan dampak dari pandemi Covid-19, baik dari segi kesehatan maupun segi ekonomi. Tercatat jika kematian penduduk suku Maori karena Covid-19 adalah sekitar 50% lebih tinggi daripada non-Maori (Wardhani 2021). Penguncian Selandia Baru selama pandemi membawa kesulitan bagi kaum minoritas seperti masyarakat asli yang cenderung berpenghasilan rendah. Mereka harus kehilangan pekerjaan dan sumber mata pencaharian.

Pemerintah Selandia Baru merespon permasalahan ekonomi yang dialami oleh suku Maori dengan memberikan bantuan dan perlindungan sosial. Contohnya seperti dengan memberikan paket dukungan ekonomi selama masa pandemi, pengurangan biaya sewa tempat tinggal, membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya (Wardhani 2021). Upaya yang dilakukan pemerintah Selandia Baru dalam mengurangi angka pengangguran masyarakat asli salah satunya dengan memberikan wadah bagi mereka yang ingin bekerja di industri atau perusahaan dan maupun yang ingin memulai bisnis mandiri.

Tabel 8. Tingkat Pekerja dan Pengangguran Masyarakat Maori Berdasarkan Usia Tahun 2021

	Tingkat Pengangguran (%)	Tingkat Pengangguran (%)	Tingkat Pekerja (%)	Tingkat Pekerja (%)
Usia	Maori	Total semua kelompok etnis	Maori	Total semua kelompok etnis
15-24 Tahun	16.9	11.8	50.3	56.8
25-34 Tahun	6.9	4.1	72.8	82.7
35-44 Tahun	6.3	2.9	77.3	84.6
45-54 Tahun	4.5	2.6	78.1	85.7
55-64 Tahun	4.5	2.4	70.4	77.6
65 Tahun Keatas	3.1	1.4	26.0	24.7

Sumber: Ministry of Business, Innovation & Employment (2021)

Berdasarkan dari tabel di atas, kesenjangan tingkat masyarakat asli yang bekerja dengan non-pribumi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan di mana persentase pekerja Maori dan non-Maori berada pada angka yang tidak begitu jauh. Namun, kesenjangan pada angka pengangguran penduduk suku

Maori dan non-Maori masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan (Ministry of Business, Innovation & Employment 2021). Hal ini berarti masih cukup banyak masyarakat asli yang belum bekerja atau menganggur. Dilansir dari laman resmi Hikina Whakatutuki New Zealand, sebanyak 33.425 penduduk Maori yang menganggur di tahun 2021. Penduduk Maori memiliki potensi pencari kerja di mana mereka sebenarnya sudah bisa mulai bekerja, namun tidak aktif mencari pekerjaan (Ministry of Business, Innovation & Employment 2021). Oleh karena itu, masyarakat suku Maori cenderung menjadi pengangguran. Mirip dengan Australia, aspek *unemployment* juga cukup menonjol di Selandia Baru dan berada pada kategori *medium*. Hal ini memperlihatkan jika tingkat dekomodifikasi masyarakat asli di Selandia Baru termasuk dalam kategori menengah di mana pemerintah memfasilitasi bisnis milik Maori karena belum sepenuhnya mampu lepas dari peran pasar.

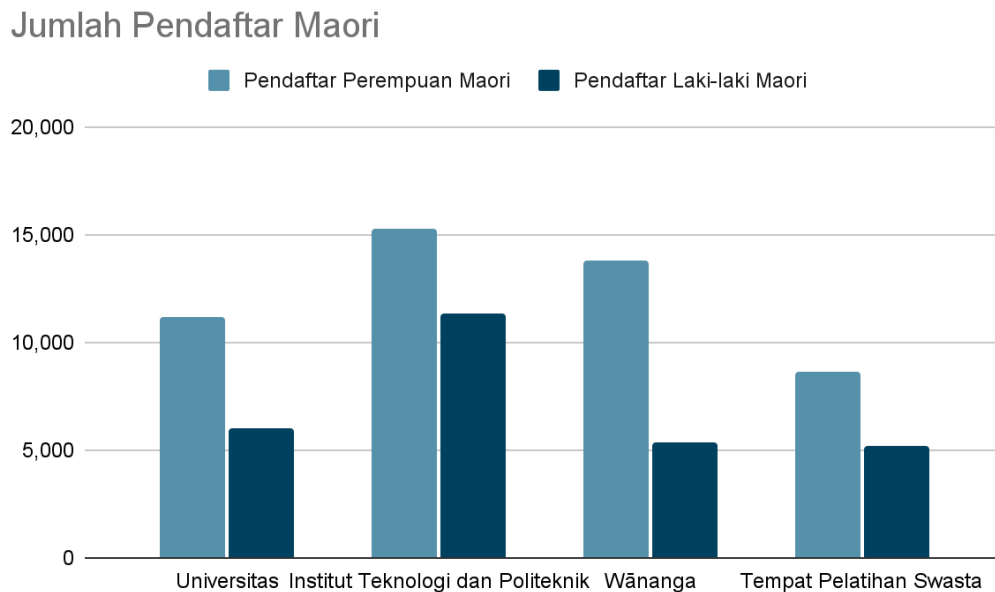
3.2. Pemenuhan *Social Rights* Masyarakat Asli di Selandia Baru

Sebagai kaum minoritas di Selandia Baru, penduduk suku Maori harus memperjuangkan hak-hak sosial mereka agar mendapatkan pengakuan dan agar diperlakukan sama dengan kelompok non-Maori oleh pemerintah. Sejak kedatangan Inggris di Selandia Baru, telah terjadi kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Waitangi atau Te Tiriti o Waitangi di tahun 1840 (IWGIA 2020). Perjanjian tersebut berisi tentang suku Maori yang memberikan hak pemerintahan kepada Inggris atas rakyatnya, dengan catatan bahwa suku Maori mendapatkan kedaulatan atas tanah, sumber daya dan harta benda lainnya, serta hak pengakuan sebagai masyarakat asli Selandia Baru (IWGIA 2020). Namun, Perjanjian

Waitangi memiliki status hukum yang terbatas sehingga perlindungan mengenai hak-hak suku Maori sangat bergantung pada kemauan politik dan pengakuan *ad hoc* perjanjian tersebut (IWGIA 2020).

Ketika berbicara mengenai hak-hak sosial, ada banyak aspek tertuang di dalamnya. Namun, hal yang menonjol adalah hak dalam mengenyam pendidikan dan hak suara dalam politik atau konstitusi. Untuk mencapai hidup yang lebih sejahtera, masyarakat asli harus memiliki pengetahuan luas dalam berbagai aspek, seperti aspek sosial, politik hingga ekonomi. Pondasi yang diperlukan untuk dapat mewujudkan hal tersebut harus dimulai dari pendidikan yang baik dan berkualitas. Dalam sektor pendidikan suku Maori, pemerintah Selandia Baru mengusung program bernama Ka Hikitia atau *The Maori Education Strategy* yang memiliki tujuan, seperti akses sistem pendidikan yang sama dengan non-Maori, bebas dari rasisme dan diskriminasi dalam bersekolah, mengedukasi lebih dalam tentang identitas dan budaya suku Maori hingga memberikan pelatihan (Ministry of Education 2020).

Grafik 4. Jumlah Pendaftar Maori di Pendidikan Tinggi Menurut Sub-sektor dan Gender Tahun 2019



Sumber: Ministry of Education (2020)

Grafik di atas menunjukkan pada tahun 2019, terdapat sekitar 73.900 pelajar Maori yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau semacamnya. Sekitar 36% memilih pendidikan di Institut Teknologi dan Politeknik, 26% terdaftar di Wānanga (institusi pendidikan tinggi berbasis nilai-nilai Maori), 23% ke universitas dan 19% memilih masuk ke lembaga pelatihan swasta (Ministry of Education 2020). Pelajar Maori yang menempuh pendidikan pada masa pemerintahan Jacinda Ardern cukup mengalami peningkatan, meskipun tidak selalu meningkat di setiap tahunnya.

Tabel 9. Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Selandia Baru Usia 25-64 Tahun 2017-2021

Kelompok Etnis	Kualifikasi Tertinggi	2017	2018	2019	2020	2021
Eropa	Tidak ada kualifikasi	12%	11%	11%	11%	12%
	Kualifikasi sekolah	23%	23%	22%	21%	21%
	Sertifikat/diploma tersier	32%	32%	32%	31%	31%
	Gelar sarjana/lebih tinggi	31%	33%	33%	34%	34%
Maori	Tidak ada kualifikasi	26%	25%	25%	24%	24%
	Kualifikasi sekolah	20%	21%	21%	21%	22%
	Sertifikat/diploma tersier	32%	33%	33%	32%	31%
	Gelar sarjana/lebih tinggi	17%	17%	17%	18%	18%
Orang-orang Pasifik	Tidak ada kualifikasi	26%	24%	26%	28%	29%
	Kualifikasi sekolah	32%	32%	32%	31%	30%
	Sertifikat/diploma tersier	26%	26%	24%	24%	23%
	Gelar sarjana/lebih tinggi	13%	15%	15%	15%	16%
Lainnya	Tidak ada kualifikasi	8%	7%	7%	8%	8%
	Kualifikasi sekolah	20%	20%	20%	19%	19%
	Sertifikat/diploma tersier	19%	18%	20%	20%	19%
	Gelar sarjana/lebih tinggi	52%	55%	52%	53%	53%

Sumber: Ministry of Education (2022)

Dari tabel di atas, kita bisa melihat jika persentase pelajar Maori yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi sudah cukup memuaskan, namun kesenjangan masih terlihat jika dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya (Mayeda et al. 2022).

Hak-hak sosial bukan hanya mencakup pendidikan, namun juga hak dalam politik. Hak suara masyarakat dalam konstitusi menjadi penting untuk diakui oleh

negara. Sejak Perjanjian Waitangi, penduduk suku Maori memiliki hak politik yang setara dengan orang Eropa, namun belum secara resmi diakui pada saat itu (New Zealand Government 2018). Perjalanan pengakuan hak suara masyarakat asli cukup panjang dan banyak melalui proses pembuatan undang-undang. Sampai pada tahun 2022 yang lalu, pemerintah Selandia Baru memperkenalkan versi terbaru RUU Pemilu, *Maori Electoral Option* (MEO) dengan tujuan mendukung pemilih Maori menggunakan hak demokratis mereka (New Zealand Government, n.d.-b). Perubahan dalam RUU ini juga mendorong partisipasi dan keterlibatan penduduk suku Maori dalam proses pemilu. Melihat dari kedua aspek ini, pemenuhan hak-hak sosial penduduk Maori berada dalam kategori *universal* di mana pemerintah memberikan perlindungan yang mengupayakan pengurangan kesenjangan. Selandia Baru tidak memprioritaskan hal yang lebih membutuhkan, namun sebisa mungkin menjangkau semua aspek. Contohnya memfokuskan semua tingkatan pendidikan, bukan hanya pada tingkat tertentu saja.

3.3. Penyediaan *Welfare Provision* untuk Masyarakat Asli oleh Selandia Baru

Sejatinya, penyediaan layanan kesejahteraan bagi warga negara mencakup semua aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun, yang seringkali menjadi kunci negara sejahtera adalah bagaimana pemerintah memberikan wadah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain dalam aspek ekonomi, penyediaan layanan kesehatan juga menjadi hal penting untuk menciptakan hidup warga negara yang lebih sejahtera. Aspek *welfare provision* bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemerintah

menyediakan layanan sosial bagi masyarakatnya serta bagaimana sistem kerja layanan tersebut. Hampir mirip dengan Australia, permasalahan ekonomi masyarakat Maori juga menjadi tantangan yang cukup besar bagi pemerintah Selandia Baru. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jika angka pengangguran masyarakat asli masih tinggi. Dilansir dari data statistik *trading economics*, terjadi peningkatan sekitar 199.000 orang menganggur di tahun 2023 di mana pada tahun sebelumnya hanya terdapat 122.000 orang Maori saja (Trading Economics 2023). Oleh karena itu, pemerintah Selandia Baru banyak mengusung program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat asli dalam bidang perekonomian. Salah satunya dengan memberikan wadah bagi penduduk suku Maori dalam mengembangkan bisnis mereka.

Tabel 10. Jumlah Bisnis Maori Berdasarkan Kelompok Industri Tahun 2017-2022

Kelompok Industri	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian	216	210	213	216	216	216
Industri primer lainnya	78	84	75	84	87	87
Operator properti non-perumahan	375	387	402	387	378	411
Semua industri lainnya	516	528	552	570	570	573
Total	1.185	1.209	1.242	1.257	1.254	1.290

Sumber: New Zealand Statistic (2023)

Tabel di atas menunjukkan jumlah data bisnis milik masyarakat Maori ketika masa pemerintahan Jacinda Ardern. Meskipun masih terjadi adanya penurunan jumlah, namun angka yang meningkat masih lebih menonjol. Pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis mandiri milik suku Maori juga menunjukkan jumlah yang memuaskan. Dilansir dari laman resmi Te Puni Kōkiri,

penjualan bisnis otoritas Maori mencapai \$4 miliar, juga berhasil mengekspor barang senilai \$870 juta di mana 44% masuk ke Tiongkok (Ministry of Māori Development 2022). Akses lapangan pekerjaan yang diberikan oleh negara tidak sepenuhnya merupakan program dari pemerintah, namun juga dari pihak-pihak swasta yang menjalin kerja sama dengan masyarakat asli (MAHI 2024). Di samping keberhasilan pemerintah Selandia Baru dalam mengembangkan bisnis suku Maori, masih ada hal lain yang perlu menjadi kekhawatiran pemerintah, yakni masalah tempat tinggal. Kebijakan-kebijakan masa lalu yang mengasingkan penduduk suku Maori dari tanah mereka mempersulit Maori dalam mengakses kepemilikan rumah (Lawson-Te Aho et al. 2019). Dilansir dari laman web resmi *Ministry of Housing and Urban Development*, sekitar 28,8% penduduk suku Maori merupakan tunawisma (Ministry of Housing and Urban Development, n.d.). Dalam upaya mengurangi angka tunawisma di Selandia Baru, pemerintah menawarkan bantuan hibah kebutuhan khusus perumahan darurat dengan pelamar terbanyak adalah masyarakat Maori mencapai 61,4% (Ministry of Housing and Urban Development, n.d.).

Aspek *welfare provision* tidak hanya mencakup bidang ekonomi, namun juga berbicara mengenai bidang pendidikan dan kesehatan. Selandia Baru menjadi salah satu negara yang sadar akan pentingnya pendidikan. Ada banyak program yang diusung oleh pemerintah Selandia Baru untuk membuat sistem pendidikan negara yang baik dan berkualitas. Beberapa contohnya seperti program pemantauan pemulihan membaca untuk siswa sekolah menengah, pelatihan literasi dan numerasi, program *homeschooling*, pelajaran Bahasa Maori di sekolah hingga penyediaan pelatihan khusus pendidikan tinggi (Ministry of Education,

n.d.). Berbeda dengan aspek ekonomi, pemerintah Selandia Baru menyediakan layanan sistem pendidikan secara penuh oleh negara. Meskipun ada cukup banyak sekolah swasta, pemerintah Selandia Baru senantiasa memberikan bantuan berupa hibah tahunan sekolah (UNESCO 2022).

Dalam aspek penyediaan layanan kesehatan, pemerintah Selandia Baru sudah sangat unggul. Sistem kesehatan, tenaga ahli dan dokter di rumah sakit-rumah sakit yang ada di negeri kiwi tersebut tidak perlu lagi untuk diragukan kualitasnya. Pelayanan kesehatan di Selandia Baru terbagi dua, yakni pelayanan kesehatan primer dan sekunder (New Zealand Government, n.d.). Layanan kesehatan primer mencakup dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan dan sebagainya yang berbasis di masyarakat. Layanan kesehatan ini seringkali berbayar, tetapi banyak juga yang disubsidi oleh pemerintah (New Zealand Government, n.d.). Sedangkan, layanan kesehatan sekunder yang berbasis rumah sakit di Selandia Baru tidak dipungut biaya selama memenuhi syarat (New Zealand Government, n.d.). Selain dua sistem layanan tersebut, ada juga sektor kesehatan swasta yang berbayar, tetapi biaya dapat diringkaskan jika memiliki asuransi kesehatan (New Zealand Government, n.d.). Sayangnya, penduduk suku Maori belum sepenuhnya dapat merasakan sistem pelayanan kesehatan yang adil. Target masa depan pemerintah Selandia Baru harus berfokus pada peningkatan pelayanan dan perluasan sistem kesehatan bagi masyarakat Maori (Goodyear-Smith and Ashton 2019). Penyediaan layanan kesejahteraan di Selandia Baru masuk ke dalam kategori *mixed services* karena pemerintah yang masih berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta maupun LSM terkait.

3.4. Pemberian *Benefits* oleh Selandia Baru bagi Masyarakat Asli

Pemberian manfaat atau *benefits* dalam teori *welfare capitalism* dilihat melalui tiga aspek sebelumnya, yakni *de-commodification*, *social rights* dan *welfare provision*. Hak sebagai warga negara, pemberian tunjangan, akses layanan kesejahteraan dan sebagainya masuk ke dalam kategori *benefits*. Pemerintah Selandia Baru telah memberikan manfaat yang cukup beragam untuk penduduk suku Maori. Penerapan kebijakan masyarakat asli pada masa pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern menunjukkan progres yang baik, meskipun masih pandemi Covid-19 sempat menghambat hal tersebut. Namun, dalam memberikan tunjangan, bantuan, layanan kesehatan, akses pendidikan dan wadah dalam bidang ekonomi untuk masyarakat Maori, pemerintah Selandia Baru sudah melakukannya dengan sangat baik. Akan tetapi, kesenjangan di beberapa aspek masih tidak dapat dihindari, salah satunya ketimpangan dalam sistem kesehatan. Kesenjangan pelayanan kesehatan terhadap penduduk suku Maori masih terjadi dan diakibatkan oleh kegagalan sistematis sehingga distribusi layanan kesejahteraan sosial masih tidak adil bagi suku Maori jika dibandingkan dengan non-Maori (Espiner et al. 2021).

Pemerintah Selandia Baru memberikan hak istimewa kepada penduduk suku Maori sebagai bentuk manfaat khusus masyarakat asli. Sama seperti negara tetangganya, Australia, pemerintah Selandia Baru juga menyediakan berbagai tunjangan, dana bantuan dan sebagainya kepada masyarakat Maori. Namun, yang membedakan adalah kelompok Maori mendapat hak istimewa berupa pengurangan biaya pajak kepada perusahaan atau bisnis milik Maori (Neha et al. 2021). Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk apresiasi dan

ucapan terima kasih kepada masyarakat Maori karena telah berkontribusi terhadap perekonomian negara (Treaty of Waitangi for Dummies 2020).

Tabel 11. Analisis Teori *Welfare Capitalism* dalam Penerapan Kebijakan Masyarakat Asli di Selandia Baru

Variabel	Hasil	Keterangan
De-commodification	Medium	Melihat dari ketiga aspek, yakni <i>pensions</i> , <i>sickness</i> dan <i>unemployment</i> , pemerintah Selandia Baru telah memberikan layanan sosial, tunjangan dan wadah kepada masyarakat asli, namun masih bersyarat dan belum tersebar secara adil.
Social rights	Universal	Pemerintah Selandia Baru berupaya memberikan perlindungan hak sosial yang seadil mungkin kepada masyarakat asli dengan menyediakan sistem pendidikan yang berbasis budaya serta mengakui hak konstitusi suku Maori.
Welfare provision	Mixed services	Pemenuhan layanan kesejahteraan sudah disediakan oleh pemerintah Selandia Baru, namun masih membuka kerja sama dengan pihak swasta, terutama dalam bidang ekonomi dan kesehatan.
Benefits	Contribution-related	Pemberian manfaat atau tunjangan bagi masyarakat asli mengacu pada kontribusi dan/atau pekerjaan, di mana penduduk asli yang memiliki kontribusi lebih akan memperoleh manfaat yang lebih pula.

Sumber: Esping-Andersen (1990)

Dari tabel di atas, dapat dilihat jika pemberian manfaat oleh pemerintah Selandia Baru kepada penduduk suku Maori termasuk dalam kategori *contribution-related* yang mengacu pada kontribusi masyarakat asli. Salah satu contohnya adalah meringankan biaya pajak bagi bisnis milik Maori yang berhasil meraup pendapatan yang cukup besar (Neha et al. 2021). Upaya mengurangi pengangguran dengan memberikan wadah untuk membuka bisnis mandiri merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh pemerintah Selandia Baru untuk penduduk suku Maori dalam aspek ekonomi. Dalam pemenuhan hak-hak sosial, khususnya dalam bidang pendidikan, pemberian manfaat kepada masyarakat Maori sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari program-program milik pemerintah yang selalu mengutamakan pengurangan kesenjangan di sekolah, pembelajaran berbasis nilai-nilai budaya dengan memasukkan pelajaran Bahasa Maori hingga upaya mempermudah akses bagi pelajar Maori untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Mane et al. 2023). Selain itu, pengakuan hak suara penduduk suku Maori dalam politik Selandia Baru juga telah tertulis dalam program maupun undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

Meskipun penerapan kebijakan masyarakat asli di Selandia Baru sudah mencapai hasil yang cukup memuaskan di beberapa aspek, masih diperlukan adanya peningkatan dalam aspek sistem kesehatan, khususnya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern. Kasus rasisme menjadi penyebab utama kesenjangan yang terjadi antara suku Maori dan non-Maori dalam hal pelayanan kesehatan (Reid, Cormack, and Paine 2019). Sistem kesehatan primer yang diterapkan oleh pemerintah Selandia Baru seharusnya dapat menjadi solusi

dalam mengatasi ketimpangan kesehatan. Pelayanan kesehatan primer memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun masih adanya kesenjangan menunjukkan perlunya pemerintah memperkuat kebijakan dan praktik dalam aspek kesehatan bagi masyarakat asli (Kidd et al. 2022). Dibutuhkan kebijakan kesehatan yang selaras dengan prinsip masyarakat suku Maori serta berpegang pada dasar dalam Perjanjian Waitangi.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hampir setiap negara yang ada di dunia memiliki penduduk asli yang telah lebih dulu menempati tanah bumi kita, termasuk Australia dan Selandia Baru. Penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres merupakan penduduk asli Australia yang telah hidup di benua Australia sejak kurang lebih 40.000 tahun yang lalu (Aboriginal Heritage Office 2024). Masyarakat Aborigin menjadi suku pertama yang mendiami benua Australia dan pada tahun 1788, diperkirakan lebih dari 750.000 orang Aborigin yang menghuni benua ini (Aboriginal Heritage Office 2024). Sebagai salah satu negara maju, Australia menjadi negara yang diakui kehebatannya dalam banyak aspek, mulai dari aspek sosial, politik hingga ekonomi. Tidak sedikit negara di dunia yang menjadikan Australia sebagai *role model* dalam menerapkan kebijakan atau undang-undang di negara mereka. Namun, dibalik *image* yang baik tersebut, nyatanya Australia juga masih kurang dalam menangani permasalahan kesenjangan antara masyarakat asli dan non-pribumi. Penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres belum sepenuhnya merasakan hidup yang lebih baik dan lebih adil dalam berbagai aspek. Tindakan rasisme, diskriminasi dan sebagainya menjadi akar permasalahan adanya ketimpangan antara masyarakat asli dan non-pribumi di Australia. Selain itu, kurang kuatnya kebijakan masyarakat asli yang dibuat pemerintah menjadikan penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres masih harus mengupayakan keadilan di tanah mereka sendiri.

Sebagai negara tetangga Australia, Selandia Baru juga masih menghadapi tantangan yang sama. Australia dan Selandia Baru memiliki banyak kemiripan, mulai dari letak wilayah, sistem pemerintahan dan politik, hingga dalam aspek ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Penduduk asli yang mendiami tanah Selandia Baru adalah bangsa Maori yang berasal dari Kepulauan Pasifik (Ministry for Culture and Heritage 2019). Sama seperti Australia, kedatangan orang kulit putih di Selandia Baru juga dimulai oleh Bangsa Inggris (Rivers 2018). Namun, terdapat perbedaan antara suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dengan suku Maori. Salah satunya, yakni telah diakuinya hak suku Maori sebagai pemilik tanah yang sah di Selandia Baru sejak tahun 1840 dalam Perjanjian Waitangi yang disepakati bersama Bangsa Inggris (Waitangi Treaty Grounds 2023). Hal ini yang menjadi perbedaan kecil Selandia Baru dan Australia dalam menerapkan kebijakan masyarakat asli. Di sisi lain, Pandemi Covid-19 yang melanda Australia dan Selandia Baru pada masa pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison dan Jacinda Ardern semakin mempengaruhi kondisi kesenjangan hidup antara masyarakat asli dan non-pribumi dalam berbagai aspek di kedua negara serumpun tersebut.

Aspek dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat asli tidak hanya dilihat dari satu bidang saja, melainkan banyak bidang-bidang yang saling terkait satu sama lain. Poin-poin yang menjadi faktor utamanya, seperti aspek dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan politik. Untuk itu, teori *welfare capitalism* oleh Gøsta Esping-Andersen menjadi teori yang tepat untuk menganalisis bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan masyarakat asli di Australia dan Selandia Baru. Melihat dari 4 variabel, yakni *de-commodification*,

social rights, *welfare provision* dan *benefits*, semua faktor utama dalam membangun negara kesejahteraan saling berkesinambungan. Esping-Andersen menilai kategori *Universal Welfare State* merupakan sistem negara kesejahteraan yang paling baik dibandingkan dua kategori lain, yakni *Liberal Welfare State* dan *Conservative Welfare State* (Esping-Andersen 1990).

Tabel 12. Perbedaan Hasil Analisis Teori *Welfare Capitalism* dalam Penerapan Kebijakan Masyarakat Asli di Australia dan Selandia Baru

Variabel	Australia	Selandia Baru
De-commodification	Medium	Medium
Social rights	Need based	Universal
Welfare Provision	Mixed services	Mixed services
Benefits	Contribution-related	Contribution-related

Sumber: Esping-Andersen (1990)

Dari tabel di atas, dapat dilihat jika dalam analisis penerapan kebijakan masyarakat asli melalui teori *welfare capitalism* di Australia dan Selandia Baru, hanya terdapat perbedaan dalam variabel kedua, yakni *social rights*. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison, pemenuhan hak-hak sosial penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres hampir tidak mengalami peningkatan sama sekali. Dalam bidang pendidikan, kemajuan terlihat pada naiknya jumlah siswa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres yang berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sedangkan jumlah kehadiran siswa di sekolah masih berada di angka yang rendah dikarenakan trauma atas peristiwa *stolen generation* di masa lalu. Namun, hak sosial yang masih belum berhasil dipenuhi pada masa pemerintahan Scott Morrison adalah melaksanakan referendum yang bertujuan untuk mengakui hak suara masyarakat asli dalam

konstitusi. Pemerintah Australia berupaya memprioritaskan penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dalam hal pemenuhan hak-hak sosial, tetapi belum berhasil menjangkau masyarakat secara adil dan menyeluruh, khususnya di daerah-daerah terpencil di Australia.

Pemenuhan hak-hak sosial bagi penduduk suku Maori pada masa pemerintahan Jacinda Ardern berada pada tingkat keberhasilan yang lebih baik jika dibandingkan dengan Australia. Dalam bidang pendidikan, jumlah siswa Maori yang berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melampaui angka milik Australia. Perbedaan tersebut terlampau cukup jauh di mana pelajar Aborigin dan Kepulauan Selat Torres hanya mencapai angka ratusan atau kurang lebih 1% dari total populasi masyarakat asli, sedangkan pelajar Maori telah menyentuh angka ribuan atau telah mencapai 7% dari total penduduk Maori. Selain itu, Selandia Baru juga memiliki Wānanga yang merupakan institusi pendidikan tinggi berbasis nilai adat dan budaya masyarakat asli Maori (Ministry of Education 2023). Dalam hal pengakuan hak suara konstitusi, pemerintah Selandia Baru secara rutin melakukan peninjauan bahkan perubahan dalam undang-undang terkait hak demokratis penduduk suku Maori agar masyarakat asli dapat berpartisipasi dalam politik. Isu pengakuan hak suara masyarakat asli tersebut yang belum berhasil dicapai oleh Australia hingga hari ini.

Jika melihat dari ketiga variabel yang lain, penerapan kebijakan masyarakat asli di Australia dan Selandia Baru berada dalam kategori yang sama. Namun, ketika lebih diperinci, Selandia Baru tetap satu langkah lebih progresif dibandingkan Australia. Pada variabel *de-commodification*, hasil kedua negara tersebut sangat serupa. Selandia Baru dan Australia masih perlu meningkatkan

sistem pelayanan kesehatan terhadap masyarakat asli agar dapat meminimalisir rasisme dan diskriminasi. Kedua negara tetangga ini juga sama-sama progresif dalam mengurangi tingkat pengangguran penduduk asli di masing-masing negara. Terdapat sedikit perbedaan dalam penyediaan tunjangan pensiun, di mana Selandia Baru menawarkan beberapa macam tunjangan sedangkan Australia hanya memiliki satu sistem tunjangan saja. Tidak terdapat perbedaan dalam variabel *welfare provision* karena kedua negara tersebut menjalin kerja sama dengan sektor swasta dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pada variabel terakhir, yakni *benefits*, Australia dan Selandia Baru memberikan manfaat yang didasarkan pada kontribusi masyarakat asli. Keduanya sama-sama unggul di aspek ekonomi, tetapi masih perlu peningkatan dalam aspek yang lain. Australia masih perlu melakukan referendum untuk mengakui hak suara penduduk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres, sedangkan Selandia Baru memerlukan peningkatan sistem layanan kesehatan bagi masyarakat Maori agar lebih baik dan aman dari rasisme serta diskriminasi.

4.2. Rekomendasi

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga perlu untuk dikembangkan. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran mengenai penelitian ini agar dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk menganalisis permasalahan masyarakat asli di Australia dan Selandia Baru melalui aspek yang lain atau lebih memperdalam aspek-aspek yang telah diteliti sebelumnya. Peneliti juga dapat mengambil cakupan penelitian dari masa pemerintahan perdana menteri yang

berbeda, contohnya ketika masa jabatan Anthony Albanese di Australia dan Christopher Luxon di Selandia Baru. Maka, penelitian ini menjadi penting untuk menjadi bahan penelitian lebih lanjut dengan tujuan agar dapat melihat peningkatan penerapan kebijakan masyarakat asli di kedua negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Alexandra, Frisca, and Rahma Daniah. 2020. "Resonansi Black Lives Matter di Australia" 01 (01): 1–12.
- Arts, Wil, and John Gelissen. 2002. "Three Worlds of Welfare Capitalism or More? A State-of-the-Art Report." *Journal of European Social Policy* 12 (2): 137–58. <https://doi.org/10.1177/0952872002012002114>.
- Barker, Fiona. 2022. "New Zealand: Political Developments and Data in 2021: From COVID Emergency to Policy Reform." *European Journal of Political Research Political Data Yearbook* 61 (1): 339–50. <https://doi.org/10.1111/2047-8852.12389>.
- Barton, Papi. 2018. "The Elephant in the Room – Nursing and Māori Health Disparities." *Kai Tiaki : Nursing New Zealand* 24 (4): 17–19.
- Benton, Madeleine, Shane Hearn, and Fernando Marmolejo-Ramos. 2021. "Indigenous Students' Experience and Engagement with Support at University: A Mixed-Method Study." *The Australian Journal of Indigenous Education* 50 (2): 256–64. <https://doi.org/10.1017/jie.2021.1>.
- Chesterman, John. 2008. "National Policy-Making in Indigenous Affairs: Blueprint for an Indigenous Review Council." *Australian Journal of Public Administration* 67 (4): 419–29. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2008.00599.x>.
- Denny-Smith, George, Megan Williams, and Martin Loosemore. 2020. "Assessing the Impact of Social Procurement Policies for Indigenous People." *Construction Management and Economics* 38 (12): 1139–57. <https://doi.org/10.1080/01446193.2020.1795217>.
- Errico, Peter d', Andrew Armitage, and Kayleen M. Hazlehurst. 1996. "Comparing the Policy of Aboriginal Assimilation: Australia, Canada, and New Zealand." *Contemporary Sociology* 25 (2): 159. <https://doi.org/10.2307/2077164>.
- Espiner, Emma, Sarah-Jane Paine, Maree Weston, and Elana Curtis. 2021. "Barriers and Facilitators for Māori in Accessing Hospital Services in Aotearoa New Zealand." *New Zealand Medical Association* 134 (1546): 47.
- Gatwiri, Kathomi, Darlene Rotumah, and Elizabeth Rix. 2021. "BlackLivesMatter in Healthcare: Racism and Implications for Health Inequity among Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples in Australia." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18 (9): 4399. <https://doi.org/10.3390/ijerph18094399>.
- Gilbert, Stephanie. 2019. "Living with the Past: The Creation of the Stolen Generation Positionality." *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples* 15 (3): 226–33. <https://doi.org/10.1177/1177180119869373>.
- Goodyear-Smith, Felicity, and Toni Ashton. 2019. "New Zealand Health System: Universalism Struggles with Persisting Inequities." *The Lancet* 394 (10196): 432–42. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)31238-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31238-3).
- Graham, Rebekah, and Bridgette Masters-Awatere. 2020. "Experiences of Māori of Aotearoa New Zealand's Public Health System: A Systematic Review of Two Decades of Published Qualitative Research." *Australian and New*

- Zealand Journal of Public Health* 44 (3): 193–200.
<https://doi.org/10.1111/1753-6405.12971>.
- Green, Anna, Penelope Abbott, Tim Luckett, Patricia Mary Davidson, John Delaney, Patricia Delaney, Hasantha Gunasekera, and Michelle DiGiacomo. 2020. “Collaborating across Sectors to Provide Early Intervention for Aboriginal and Torres Strait Islander Children with Disability and Their Families: A Qualitative Study of Provider Perspectives.” *Journal of Interprofessional Care* 34 (3): 388–99.
<https://doi.org/10.1080/13561820.2019.1692798>.
- Howard-Wagner, Deirdre. 2019. “Success in Closing the Socio-Economic Gap, But Still a Long Way to Go: Urban Aboriginal Disadvantage, Trauma, and Racism in the Australian City of Newcastle.” *International Indigenous Policy Journal* 10 (1). <https://doi.org/10.18584/iipj.2019.10.1.3>.
- Kidd, Jacquie, Heather Came, Claire Doole, and Ngaire Rae. 2022. “A Critical Analysis of *Te Tiriti o Waitangi* Application in Primary Health Organisations in Aotearoa New Zealand: Findings from a Nationwide Survey.” *Health & Social Care in the Community* 30 (1). <https://doi.org/10.1111/hsc.13417>.
- Kingston, Geoffrey, and Susan Thorp. 2019. “Superannuation in Australia: A Survey of the Literature.” *Economic Record* 95 (308): 141–60.
<https://doi.org/10.1111/1475-4932.12443>.
- Larke, Benjamin M., Gerald A. Broe, Gail Daylight, Brian Draper, Robert G. Cumming, Wendy Allan, Terrence Donovan, Daniel Costa, Suncica Lah, and Kylie Radford. 2021. “Patterns and Preferences for Accessing Health and Aged Care Services in Older Aboriginal and Torres Strait Islander Australians.” *Australasian Journal on Ageing* 40 (2): 145–53.
<https://doi.org/10.1111/ajag.12864>.
- Lawson-Te Aho, Keri, Paikea Fariu-Ariki, Jenny Ombler, Clare Aspinall, Philippa Howden-Chapman, and Nevil Pierse. 2019. “A Principles Framework for Taking Action on Māori/Indigenous Homelessness in Aotearoa/New Zealand.” *SSM - Population Health* 8 (August):100450.
<https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100450>.
- Mane, Jo, Jenny Lee-Morgan, Ruia Aperahama, and Jo Gallagher. 2023. “Reviewing Flexible Learning Spaces for Māori-Medium Education.” *MAI Journal: A New Zealand Journal of Indigenous Scholarship* 12 (2): 226–34.
<https://doi.org/10.20507/MAIJournal.2023.12.2.11>.
- Mayeda, David, Alan France, Tepora Pukepuke, Lucy Cowie, and Marilyn Chetty. 2022. “Colonial Disparities in Higher Education: Explaining Racial Inequality for Māori Youth in Aotearoa New Zealand.” *Social Policy and Society* 21 (1): 80–92. <https://doi.org/10.1017/S1474746421000464>.
- Morris, Shireen. 2014. “LESSONS FROM NEW ZEALAND: TOWARDS A BETTER WORKING RELATIONSHIP BETWEEN INDIGENOUS PEOPLES AND THE STATE.” *Indigenous Law Centre* 18 (02): 67–87.
https://doi.org/10.1163/2210-7975_HRD-1758-2015003.
- Neha, Tia, Angus Macfarlane, Sonja Macfarlane, Te Hurinui Clarke, Melissa Derby, Toni Torepe, Fiona Duckworth, Marie Gibson, Roisin Whelan, and Jo Fletcher. 2021. “Sustainable Prosperity and Enterprises for Maori Communities in Aotearoa New Zealand: A Review of the Literature.” *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global*

- Economy* 15 (4): 608–25. <https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0133>.
- Reid, P., D. Cormack, and S.-J. Paine. 2019. “Colonial Histories, Racism and Health—The Experience of Māori and Indigenous Peoples.” *Public Health* 172 (July): 119–24. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2019.03.027>.
- Ring, Ian, and Kalinda Griffiths. 2021. “Australian Aboriginal and Torres Strait Islander Health Information: Progress, Pitfalls, and Prospects.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18 (19): 10274. <https://doi.org/10.3390/ijerph181910274>.
- Sainsbury, Tristram, and Robert Breunig. 2020. “The Australian Tax Planning Playbook: Volume 1.” *Tax and Transfer Policy Institute* 1 (1): 1–30.
- Sheridan, Nicolette, Rawiri McKree Jansen, Matire Harwood, Tom Love, Timothy Kenealy, The Primary Care Models Study Group, Nelson Aguirre-Duarte, et al. 2024. “Hauora Māori – Māori Health: A Right to Equal Outcomes in Primary Care.” *International Journal for Equity in Health* 23 (1): 42. <https://doi.org/10.1186/s12939-023-02071-6>.
- Wardhani, Baiq. 2021. “The Kiwi Way: New Zealand’s COVID-19 Elimination Strategy The Kiwi Way: Strategi Eliminasi COVID-19 Selandia Baru.” *Global Strategis* 14 (2): 297–314.
- Wikaire, Erena, Matire Harwood, Kayla Wikaire-Mackey, Sue Crengle, Rachel Brown, Anneka Anderson, Rawiri McKree Jansen, and Rawiri Keenan. 2022. “Reducing Healthcare Inequities for Māori Using Telehealth During.” *New Zealand Medical Journal*.

Artikel Daring

- ABC Australia. 2022. “Pemimpin Aborigin Australia Desak Referendum Paling Lambat Tahun 2024.” *Tempo*. April 12, 2022. <https://www.tempo.co/abc/7512/pemimpin-aborigin-australia-desak-referendum-paling-lambat-tahun-2024>.
- Aboriginal Heritage Office. 2024. “A Brief Aboriginal History.” Aboriginal Heritage Office. 2024. <https://www.aboriginalheritage.org/history/history/>.
- Australian Bureau of Statistics. 2021. “Estimates of Aboriginal and Torres Strait Islander Australians.” Australian Bureau of Statistics. June 30, 2021. <https://www.abs.gov.au/statistics/people/aboriginal-and-torres-strait-islander-peoples/estimates-aboriginal-and-torres-strait-islander-australians/latest-release#data-downloads>.
- Australian Taxation Office. 2023. “Choosing Super Fund.” Australian Taxation Office. August 1, 2023. <https://www.ato.gov.au/individuals-and-families/super-for-individuals-and-families/super/choosing-a-super-fund>.
- Britannica. 2024. “New Zealand Labour Party.” *Encyclopedia Britannica*. March 1, 2024. <https://www.britannica.com/topic/New-Zealand-Labour-Party>.
- Britt’s, Katie. 2019. “Māori Land Rights Leader Calls on Jacinda Ardern to Recognise Indigenous ‘Crisis.’” *The Guardian*. August 1, 2019. <https://www.theguardian.com/world/2019/aug/02/maori-land-rights-leader-calls-on-jacinda-ardern-to-recognise-indigenous-crisis>.
- IWGIA. 2020. “Indigenous World 2020: Aotearoa (New Zealand).” International Work Group for Indigenous Affairs. May 11, 2020. <https://www.iwgia.org/en/aotearoa-new-zealand/3641-iw-2020-aotearoa-new-zealand>.

- zealand.html.
- Kedutaan Besar Australia. 2023. "Penduduk, Kebudayaan Dan Gaya Hidup." Kedutaan Besar Australia. 2023. https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/penduduk_kebudayaan.html.
- Khotimah, Siti. 2019. "Australia Mengaku Gagal Menyejahterakan Masyarakat Suku Aborigin." Liputan 6. February 15, 2019. <https://www.liputan6.com/global/read/3895179/australia-mengaku-gagal-menyejahterakan-masyarakat-suku-aborigin>.
- Kumparan. 2017. "177 Tahun Perjanjian Waitangi, Hari Raya Selandia Baru." Kumparan. March 7, 2017. <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/177-tahun-pejanjian-waitangi-hari-raya-selandia-baru/full>.
- MAHI. 2024. "Ko Ngā Turanga Wātea." Maori-Focused Employment Opportunities. 2024. <https://www.mahi.co.nz/>.
- Ministry for Culture and Heritage. 2019. "Māori Explore the World." New Zealand History. February 19, 2019. <https://nzhistory.govt.nz/culture/encounters/maori-encountering-world>.
- Ministry of Business, Innovation & Employment. 2021. "Overview of Māori Employment Outcomes in Aotearoa New Zealand." Ministry of Business, Innovation & Employment. 2021. <https://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/employment-and-skills/employment-strategy/maori-employment-action-plan/annexes/overview-of-maori-employment-outcomes-in-aotearoa-new-zealand>.
- Ministry of Education. 2022. "Tertiary Achievement and Attainment." Education Counts. October 2022. <https://www.educationcounts.govt.nz/statistics/achievement-and-attainment>.
- Ministry of Education. 2023. "Wānanga Enabling Framework." Te Tāhuhu o Te Mātauranga. November 9, 2023. <https://www.education.govt.nz/our-work/legislation/wananga-sector-framework/>.
- Ministry of Education. n.d. "Education Statistics." Education Counts. Accessed May 22, 2024. https://www.educationcounts.govt.nz/statistics?edcountsfilters_sector=Schooling&edcountsfilters_sector=Tertiary&edcountsfilters_keythemes=Education%20and%20Learning%20Outcomes&edcountsfilters_keythemes=Student%20Engagement%20Participation&edcountsfilters_demographicdata=Ethnic%20Group.
- Ministry of Housing and Urban Development. n.d. "Homelessness Outlook." Te Tūāpapa Kura Kāinga. Accessed May 22, 2024. <https://www.hud.govt.nz/stats-and-insights/homelessness-outlook/homelessness-indicators>.
- Ministry of Māori Development. 2022. "New Data on Māori Businesses." Te Puni Kōkiri. September 15, 2022. <https://www.tpk.govt.nz/en/mo-te-puni-kokiri/our-stories-and-media/new-data-on-maori-businesses>.
- National Library of Australia. 2022. "The Aboriginal and Torres Strait Islander Commission: Toward a History." National Library of Australia. 2022. <https://www.nla.gov.au/whats-on/events/aboriginal-and-torres-strait-islander->

- commission-toward-history.
- New Zealand Government. 2018. "Māori and the Vote." New Zealand History. December 20, 2018. <https://nzhistory.govt.nz/politics/maori-and-the-vote>.
- New Zealand Government. 2021. "Growth in Life Expectancy Slows." Stats NZ. April 20, 2021. <https://www.stats.govt.nz/news/growth-in-life-expectancy-slows/>.
- New Zealand Government. 2021. "Māori Population Estimates: At 30 June 2021." Stats NZ. November 16, 2021. <https://www.stats.govt.nz/information-releases/maori-population-estimates-at-30-june-2021/>.
- New Zealand Government. 2023. "Tatauranga Umanga Māori – Statistics on Māori Businesses: 2022 (English)." Stats NZ. August 29, 2023. <https://www.stats.govt.nz/information-releases/tatauranga-umanga-maori-statistics-on-maori-businesses-2022-english/>.
- New Zealand Government. 2023. "Te Wiki o Te Reo Māori - Māori Language Week." New Zealand History. September 12, 2023. <https://nzhistory.govt.nz/culture/maori-language-week/history-of-the-maori-language>.
- New Zealand Government. n.d. "About the New Zealand Health Care System." Health New Zealand. Accessed May 22, 2024. <https://www.southernhealth.nz/getting-help-you-need/how-health-system-works/about-new-zealand-health-care-system>.
- New Zealand Government. n.d. "Māori Electoral Option." Ministry of Justice. Accessed May 21, 2024. <https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/key-initiatives/key-initiatives-archive/maori-electoral-option/>.
- NIAA. 2021. "Changes to the Indigenous Advancement Strategy (IAS) Grant Guidelines." National Indigenous Australians Agency. July 26, 2021. <https://www.niaa.gov.au/news-centre/indigenous-affairs/changes-indigenous-advancement-strategy-ias-grant-guidelines>.
- NIAA. 2021. "Procurement Policy Generates \$5.3 Billion in Contracts for over 2,600 Indigenous Businesses." National Indigenous Australians Agency. November 4, 2021. <https://www.niaa.gov.au/news-centre/indigenous-affairs/procurement-policy-generates-53-billion-contracts-over-2600-indigenous-businesses>.
- NIAA. n.d. "The Agency." National Indigenous Australians Agency. Accessed January 27, 2024. <https://www.niaa.gov.au/who-we-are/the-agency>.
- Parliament of Australia. n.d. "Former Aboriginal and Torres Strait Islander Australian Government Representative and Advisory Bodies: A Quick Guide." Parliament of Australia. Accessed March 15, 2024. https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2223/Quick_Guides/FormeralAboriginalandTorresStraightIslanderRepresentativeBodies.
- Rahman, Arpan. 2019. "Australia Janjikan Referendum Pengakuan Aborigin Dalam Konstitusi." Medcom.Id. July 11, 2019. <https://www.medcom.id/internasional/asia/VNxZ3E8k-australia-janjikan-referendum-pengakuan-aborigin-dalam-konstitusi>.
- Smale, Aaron. 2021. "Jacinda Ardern's COVID Stumble May Cost Maori Lives."

- Aljazeera. October 15, 2021. <https://www.aljazeera.com/opinions/2021/10/15/jacinda-arderns-covid-stumble-may-cost-maori-lives>.
- Stats NZ. n.d. "Business Demography Statistics." Stats NZ DataInfo+. Accessed May 22, 2024. <https://datainfoplus.stats.govt.nz/Item/nz.govt.stats/bdb02aa2-866e-418f-83e8-342234867a0f#/nz.govt.stats/bdb02aa2-866e-418f-83e8-342234867a0f>.
- The World Bank. n.d. "GDP per Capita (Current US\$) - Australia | Data." World Bank Open Data. Accessed January 15, 2024. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AU>.
- The World Bank. n.d. "GDP per Capita (Current US\$) - New Zealand, Upper Middle Income." The World Bank. Accessed May 20, 2024. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=NZ-XT>.
- Trading Economics. 2023. "Selandia Baru - Tingkat Pengangguran." Trading Economics. 2023. <https://id.tradingeconomics.com/new-zealand/unemployment-rate>.
- Treaty of Waitangi for Dummies. 2020. "Maori Privilege." Treaty4dummies. August 22, 2020. <https://sites.google.com/site/treaty4dummies/home/maori-only-privileges>.
- Waitangi Treaty Grounds. 2023. "History of Waitangi." Waitangi Treaty Grounds. 2023. <https://www.waitangi.org.nz/about/history>.
- Wong, Tessa. 2023. "PM Selandia Baru Mengundurkan Diri: Tekanan Unik Yang Dihadapi Jacinda Ardern." BBC News Indonesia. January 20, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-64334756>.

Buku

- Allen, Joanne, and Kathie Irwin. 2023. *Experiences of Secure and Precarious Employment Among Older Māori - Data Insights*. New Zealand: Creative Commons Attribution.
- Ebbinghaus, Bernhard, and Philip Manow, eds. 2006. *Comparing Welfare Capitalism Social Policy and Political Economy in Europe, Japan and the USA*. 1st edition. London: Routledge.
- Esping-Andersen, Gøsta. 1990. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Reprint. Cambridge: Polity Press.
- Rivers, Charles. 2018. *The Maori: The History and Legacy of New Zealand's Indigenous People*. Illustrated. New Zealand: Createspace Independent Publishing.
- Swartz, Sharlene, Nidhi Singal, and Madeleine Arnot. 2023. *Educational Research Practice in Southern Contexts: Recentring, Reframing and Reimagining Methodological Canons*. 1st ed. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003355397>.

Dokumen

- Australian Government. 2019. "Order to Establish the National Indigenous Australians Agency as an Executive Agency." <https://www.legislation.gov.au/C2019G00474/latest/text>.
- Australian Government. 2020. "Indigenous Procurement Policy Guide." National Indigenous Australians Agency.

Laporan

- Ace Consulting. 2022. "Te Tiriti o Waitangi Audit of APEC 2021." Technical Report. Ace Consulting. https://www.researchgate.net/profile/Jason-Mika/publication/368956558_Te_Tiriti_o_Waitangi_audit_of_APEC_2021/links/6401920c0d98a97717d32a18/Te-Tiriti-o-Waitangi-audit-of-APEC-2021.pdf.
- Australian Government. 2020. "Annual Report 2019–20." Technical Report. National Indigenous Australians Agency.
- Australian Government. 2020. "Closing the Gap Report 2020." Technical Report. Australian Government. <https://ctgreport.niaa.gov.au/>.
- Australian Government. 2022. "Commonwealth Closing the Gap Annual Report 2022." Technical Report. Australian Government.
- Australian Government. n.d. "National Indigenous Australians Agency 2020–21 Annual Report." Annual Report. National Indigenous Australians Agency.
- Health New Zealand and Māori Health Authority. 2022. "Te Pae Tata Interim New Zealand Health Plan." Technical Report. Health New Zealand.
- Hoffman, Shane. 2020. "Health Check 2020." Technical Report. Partnership Agreement on Closing the Gap.
- Ministry of Education. 2020. "Ngā Haeata o Aotearoa: Ka Hikitia 2019 Report." Technical Report. The Māori Education Strategy.
- OECD. 2023. "Pensions at a Glance 2023." Technical Report.
- Schneider, Eric, Arnav Shah, Michelle Doty, Roosa Tikkanen, Katharine Fields, and Reginald Williams. 2021. "MIRROR, MIRROR 2021 Reflecting Poorly: Health Care in the U.S. Compared to Other High-Income Countries." The Commonwealth Fund. <https://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2021/aug/mirror-mirror-2021-reflecting-poorly>.
- UNESCO. 2022. "New Zealand: NON-STATE ACTORS IN EDUCATION." Global Education Monitoring Report. <https://education-profiles.org/oceania/new-zealand/~non-state-actors-in-education#Non-state%20education%20provision>.